

**RENCANA KERJA  
PERANGKAT DAERAH**

**TAHUN  
2021**

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KOTA BLITAR  
2021**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan hidayahNya, sehingga kami dapat menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar.

Ucapan terima kasih yang sebesar – besarnya kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu di setiap kegiatan bersama Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar.

Kritik dan saran sungguh kami harapkan sehingga akan dapat dijadikan masukan bagi penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 dari Satuan Polisi Pamong Praja ke depan agar lebih sempurna.

Harapan kami dengan telah tersusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2021 ini dapat dijadikan dasar dalam setiap pelaksanaan kegiatan bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar 1 ( satu ) tahun ke depan.

Blitar, Mei 2020

Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
Kota Blitar



**MUH. HADI MASKUN,SE**

Pembina Tingkat I

NIP 196406171990031010

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b>	i
<b>DAFTAR ISI</b>	ii
<b>DAFTAR TABEL</b>	iii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b>	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
<b>BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU</b>	8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	34
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	41
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	44
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	53
<b>BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH</b>	57
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	57
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	61
<b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH</b>	63
<b>BAB V PENUTUP</b>	74

## DAFTAR TABEL

- Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2019
- Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Sesuai Permendagri Nomor 69 Tahun 2012
- Tabel 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal P RKPD Tahun 2021
- Tabel 2.5 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2021
- Tabel 3.1 Tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar Tahun 2021
- Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I Pemetaan Sesuai PMDN 90 Tahun 2019 Alokasi Anggaran Tahun 2021
- Lampiran II Pemetaan Sesuai PMDN 90 Tahun 2019 Alokasi Anggaran Tahun 2021 ( beserta indikator )

# BAB I. PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

**R**encana Kerja Perangkat Daerah ( Renja PD ) adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 ( satu ) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dimulai dengan persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah dengan mengumpulkan pengolahan data dan informasi. Menganalisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah untuk menentukan isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu berdasarkan Renstra Perangkat Daerah yang didasarkan pada penelaahan rancangan awal RKPD. Selanjutnya menjadi penelaahan usulan kegiatan masyarakat.

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang *Standar Pelayanan Minimal* maka dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 Satuan Polisi Pamong Praja akan diarahkan untuk mewujudkan amanat dari peraturan tersebut tetapi tetap berdasarkan prinsip kesesuaian, kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran dan ketepatan sasaran. Ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Daerah kabupaten / kota terdiri atas :

- a. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
- b. Pelayanan informasi rawan bencana;
- c. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
- d. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan
- e. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Ada 3 peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah tersebut khususnya untuk urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yaitu 1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 *tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal*, 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 *tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten / Kota* dan 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 *tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota*.

Sebagai dokumen perencanaan perangkat daerah, maka Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 Satuan Polisi Pamong Praja disusun dengan prinsip – prinsip sebagai berikut :

1. Berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu pada RKPD;
2. Rumusan program / kegiatan di dalam Renja Perangkat Daerah didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib / pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing – masing Perangkat Daerah;
3. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun n + 1;
4. Penyusunan Renja Perangkat Daerah bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD;
5. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah mengutamakan penerapan Standar Pelayanan Minimal ( SPM ) sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018.

## 1.2 Landasan Hukum

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 berdasarkan pada :

1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4421 );
3. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;
4. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undag Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5679 ) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83) ;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19) ;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksana Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5887 );
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 );
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali , terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310 ) ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312 ) ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor ..... ) ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor...);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal

- Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten / Kota ( Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 1619 );
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman Dan Ketertiban Umum DI Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158 );
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor....);
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447 ) ;
  21. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ( Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4 ) ;
  22. Peraturan Daerah Blitar Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2017 Nomor 6) ;
  23. Peraturan Walikota Blitar Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja ;
  24. Peraturan Walikota Blitar Nomor .... Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2021 .

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dimaksudkan sebagai acuan penyusunan rencana pembangunan bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat agar lebih terarah, tepat sasaran, tepat waktu, dan sinergis antar sector dan wilayah.

Adapun tujuan disusunnya Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

- a. Menyajikan capaian kinerja pelayanan tahun lalu sebagai dasar penyusunan rencana Tahun 2021;
- b. Menyajikan isu strategis, tujuan dan sasaran perangkat daerah sebagai fokus pelayanan yang akan diwujudkan dan dikedepankan ;
- c. Merumuskan program dan kegiatan yang terarah dan tepat sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah;
- d. Menyediakan pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah ( RKA SKPD ).

#### 1.4 Sistematika Penulisan

Rangkaian pemikiran Rencana Kerja Perangkat Daerah ini diformulasikan dalam sistematika penulisan sebagai berikut :

- BAB I** Pendahuluan, menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan
- BAB II** Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu, berisikan evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun lalu dan capaian Renstra perangkat daerah, Analisis kinerja pelayanan perangkat daerah, Isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, Review terhadap rancangan awal RKPD, dan Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat
- BAB III** Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, menguraikan mengenai Telaahan terhadap kebijakan nasional, Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah
- BAB IV** Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah, menguraikan faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, Uraian mengenai garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan
- BAB V** Penutup, menguraikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah – kaidah pelaksanaan dan rencana tindak

lanjut penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah

## BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

**D**alam pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 ada program dan kegiatan yang melebihi, memenuhi maupun tidak memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan. Ada beberapa program dan kegiatan yang mengalami perubahan nomenklatur / nama, sehingga nomenklatur program dan kegiatan antara tahun 2017, 2018 dan 2019 tidak sama berikut indikatornya dan ditunjukkan dalam tabel berikut.

Tabel Perubahan Nomenklatur Program dan Kegiatan Tahun 2017, Tahun 2018, dan Tahun 2019

TAHUN 2017			TAHUN 2018			TAHUN 2019		
Kode	Program / Kegiatan	Indikator	Kode	Program / Kegiatan	Indikator	Kode	Program / Kegiatan	Indikator
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Persentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi perkantoran</b>		<b>Program Pelayanan Perkantoran</b>	<b>Persentase kecukupan pelayanan perkantoran</b>	1.05.1.05.01.01	<b>Program Pelayanan Perkantoran</b>	<b>Persentase kecukupan pelayanan perkantoran</b>
	Kegiatan Penyediaan Alat tulis Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor yang terpenuhi		Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	1.05.1.05.01.01.01	Kegiatan Pengelolaan Administrasi Perkantoran	Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia
	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi		Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang tersedia			Jumlah lembar penggandaan
	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia dalam satu tahun		Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia			Jumlah barang cetakan yang tersedia
								Jumlah bahan bacaan yang tersedia

TAHUN 2017			TAHUN 2018			TAHUN 2019		
Kode	Program / Kegiatan	Indikator	Kode	Program / Kegiatan	Indikator	Kode	Program / Kegiatan	Indikator
	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah paket makanan dan minuman yang tersedia		Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah dos / kotak mamin yang tersedia Jumlah porsi mamin yang tersedia		Kegiatan Pengelolaan Administrasi Perkantoran	Jumlah dos/kotak makanan dan minuman yang tersedia Jumlah porsi makanan minuman yang tersedia
	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang terbayarkan		Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang terbayarkan	1.05.1.05.01.01.04	Kegiatan Penyusunan Perencanaan, Pengelolaan Dan Pelaporan Sarana Prasarana Perkantoran	Jumlah rekening yang terbayarkan
	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah unit kendaraan dinas yang terbayarkan pajaknya		Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah unit kendaraan dinas yang terbayarkan pajaknya			Jumlah kendaraan dinas yang terbayarkan pajaknya
	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga yang disediakan		Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia			Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang tersedia

TAHUN 2017			TAHUN 2018			TAHUN 2019		
Kode	Program / Kegiatan	Indikator	Kode	Program / Kegiatan	Indikator	Kode	Program / Kegiatan	Indikator
	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang tersedia		Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan yang tersedia			Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia
	Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Jumlah rapat - rapat koordinasi dan konsultasi regional dan nasional yang diikuti		Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Jumlah rapat - rapat koordinasi dan konsultasi regional dan nasional yang diikuti	1.05.1.05.01.01.02	Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Jumlah rapat rapat koordinasi dan konsultasi regional dan nasional yang diikuti
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik</b>	-	-	-			
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara		Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	1.05.1.05.01.01.04	Kegiatan Penyusunan Perencanaan, Pengelolaan Dan Pelaporan Sarana Prasarana Perkantoran	Jumlah bangunan kantor yang terpelihara

TAHUN 2017			TAHUN 2018			TAHUN 2019		
Kode	Program / Kegiatan	Indikator	Kode	Program / Kegiatan	Indikator	Kode	Program / Kegiatan	Indikator
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara		Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	1.05.1.05.01.01.04	Kegiatan Penyusunan Perencanaan, Pengelolaan Dan Pelaporan Sarana Prasarana Perkantoran	Jumlah perlengkapan bangunan kantor yang terpelihara
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang terpelihara		Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang terpelihara			Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara
	Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang terpenuhi		Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpenuhi			Jumlah peralatan gedung kantor yang terpenuhi
	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang terpenuhi	-	-	-			-
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara		Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara			Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara
						1.05.1.05.01.01.03	Kegiatan Penyediaan Jasa Perkantoran	Jumlah iuran kebersihan yang terbayarkan

TAHUN 2017			TAHUN 2018			TAHUN 2019		
Kode	Program / Kegiatan	Indikator	Kode	Program / Kegiatan	Indikator	Kode	Program / Kegiatan	Indikator
						1.05.1.05.01.01.05	Kegiatan Penyusunan dan Pelaporan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen ketatalaksanaan yang tersusun
						1.05.1.05.01.01.06	Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah jenis dokumen laporan keuangan yang tersusun
	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Persentase aparatur memperoleh fasilitas kelengkapan dinas khusus</b>		<b>Program Peningkatan Kapasitas Perangkat Daerah</b>	<b>Tingkat partisipasi aktif perangkat daerah dalam agenda pemda kota blitar</b>	<b>1.05.1.05.01.02</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Perangkat Daerah</b>	<b>Tingkat partisipasi aktif perangkat daerah dalam agenda pemda kota blitar</b>
	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah jenis pakaian dinas dan kelengkapannya yang tersedia		Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah jenis pakaian dinas dan kelengkapannya yang terpenuhi	1.05.1.05.01.02.01	Kegiatan Pengelolaan Administrasi dan Kelengkapan Kepegawaian	Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang terpenuhi
	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Persentase aparatur yang memperoleh kesempatan peningkatan kapasitas</b>	-	-	-			Jumlah pegawai yang mendapatkan fasilitasi pembinaan kepegawaian

TAHUN 2017			TAHUN 2018			TAHUN 2019		
Kode	Program / Kegiatan	Indikator	Kode	Program / Kegiatan	Indikator	Kode	Program / Kegiatan	Indikator
	Kegiatan Peningkatan Ketrampilan dan Profesionalisme	Jumlah peserta pembinaan jasmani		Kegiatan Peningkatan Ketrampilan dan Profesionalisme	Jumlah aparatur yang mengikuti kegiatan peningkatan ketrampilan dan profesionalisme			
	<b>Program Peningkatan Kapasitas Satuan Kerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah</b>	-	-	-			-
	Kegiatan Fasilitasi Keperansertaan Pada Event Daerah dan Hari Besar Nasional	Jumlah event daerah dan hari besar nasional yang diikuti		Kegiatan Fasilitasi Keperansertaan Pada Event Daerah dan Hari Besar Nasional	Jumlah event daerah dan hari besar nasional yang diikuti			Jumlah event daerah dan hari besar nasional yang diikuti
	Kegiatan Penyebarluasan Informasi Program/Kegiatan SKPD	Jumlah penyebarluasan informasi program / kegiatan SKPD		Kegiatan Penyebarluasan Informasi Program/Kegiatan SKPD	Jumlah publikasi / kegiatan perangkat daerah	1.05.1.05.01.02.02	Kegiatan Pengelolaan Publikasi dan Informasi Perangkat Daerah	Jumlah publikasi / kegiatan perangkat daerah
	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun</b>		<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan perangkat daerah tersusun tepat waktu dan sesuai aturan Nilai SKM</b>	<b>1.05.1.05.01.03</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan perangkat daerah tersusun tepat waktu dan sesuai aturan Nilai SKM</b>

TAHUN 2017			TAHUN 2018			TAHUN 2019		
Kode	Program / Kegiatan	Indikator	Kode	Program / Kegiatan	Indikator	Kode	Program / Kegiatan	Indikator
	Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah jenis dokumen yang tersusun		Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah jenis dokumen yang tersusun ( SPIP , SPM, SOP, LKJIP, LPPD, IKM )	-	-	-
	Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran	Jumlah jenis dokumen yang tersusun		Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran	Jumlah jenis dokumen yang tersusun ( Renstra, Renja, IKU/IKI, PK, DPA, DPPA )	1.05.1.05.01.03.01	Kegiatan Penyusunan dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun
	<b>Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan</b>	<b>Persentase poskamling aktif</b>		<b>Program Peningkatan Kenyamanan Lingkungan</b>	<b>Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang tertangani sesuai prosedur</b>	<b>1.05.1.05.01.05</b>	<b>Program Peningkatan Kenyamanan Lingkungan</b>	<b>Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang tertangani sesuai prosedur</b>
					<b>Persentase poskamling aktif</b>			<b>Persentase poskamling aktif</b>
	Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan	Jumlah kegiatan patroli sistem keamanan lingkungan		Kegiatan Pengendalian Keamanan Daerah	Jumlah laporan hasil patroli sistem keamanan lingkungan	1.05.1.05.01.05.01	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparat Satuan Perlindungan Masyarakat	Jumlah laporan hasil patrol wilayah terkait ketertiban umum

TAHUN 2017			TAHUN 2018			TAHUN 2019		
Kode	Program / Kegiatan	Indikator	Kode	Program / Kegiatan	Indikator	Kode	Program / Kegiatan	Indikator
	<b>Program Peningkatan Kapasitas Satuan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>Persentase anggota linmas yang memperoleh peningkatan kapasitas</b>	-	-	-			-
	Kegiatan Pelatihan Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat bagi Anggota Linmas	Jumlah peserta pelatihan		Kegiatan Pelatihan Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat bagi Anggota Linmas	Jumlah peserta pelatihan			Jumlah peserta pelatihan tanggap darurat
	Kegiatan Pengembangan Kapasitas Satuan Perlindungan Masyarakat	Jumlah kegiatan pengembangan kapasitas satuan perlindungan masyarakat	-	-	-			-
	Kegiatan Pengerahan Dukungan Satuan Perlindungan Masyarakat	Jumlah kegiatan yang melibatkan satuan perlindungan masyarakat		Kegiatan Pengerahan Dukungan Satuan Perlindungan Masyarakat	Jumlah kegiatan yang melibatkan satuan perlindungan masyarakat			Jumlah anggota linmas yang terlibat dalam kegiatan Satpol PP

TAHUN 2017			TAHUN 2018			TAHUN 2019		
Kode	Program / Kegiatan	Indikator	Kode	Program / Kegiatan	Indikator	Kode	Program / Kegiatan	Indikator
	<b>Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal</b>	<b>Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang terselesaikan sesuai prosedur</b>	-	-	-	-	-	-
	Kegiatan Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan Dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah operasi gabungan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum		Kegiatan Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan Dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah laporan hasil operasi gabungan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	1.05.1.05.01.05.03	Kegiatan Pengendalian, Operasional dan Penanganan Gangguan Ketertiban Umum	Jumlah laporan hasil operasi gabungan penanganan gangguan ketertiban umum secara represif non yustisi
	Kegiatan Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Lingkungan	Jumlah patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	-	-	-			Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan terkait Polisi Pamong Praja
	Kegiatan Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah lokasi aset statis pemkot blitar yang diamankan		Kegiatan Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah lokasi aset statis pemkot blitar yang diamankan	1.05.1.05.01.05.02	Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah lokasi gedung pemkot blitar yang diamankan
		Jumlah pengamanan lokasi kegiatan pemerintah daerah dan pejabat negara			Jumlah pengamanan lokasi kegiatan pemerintah daerah dan pejabat negara			Jumlah laporan pengamanan lokasi kegiatan pemerintah daerah dan pejabat negara

TAHUN 2017			TAHUN 2018			TAHUN 2019		
Kode	Program / Kegiatan	Indikator	Kode	Program / Kegiatan	Indikator	Kode	Program / Kegiatan	Indikator
					Jumlah laporan patroli gangguan ketentraman dan ketertiban umum			Jumlah laporan patroli penanganan gangguan ketertiban umum preemtif dan preventif
	Kegiatan Kerjasama Pengembangan Kemampuan Aparat Polisi Pamong Praja	Jumlah partisipasi event terkait polisi pamong praja		Kegiatan Kerjasama Pengembangan Kemampuan Aparat Polisi Pamong Praja	Jumlah peserta event terkait polisi pamong praja	-	-	-
	<b>Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran</b>	<b>Persentase korban kebakaran yang tertangani</b>		<b>Program Peningkatan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran</b>	<b>Persentase korban kebakaran yang tertangani</b>	<b>1.05.1.05.01.06</b>	<b>Program Peningkatan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran</b>	<b>Persentase korban kebakaran yang tertangani</b>
	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	Jumlah jenis pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran		Kegiatan Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	Jumlah laporan hasil pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran Jumlah peralatan dan perlengkapan pemadam kebakaran yang tersedia	1.05.1.05.01.06.0 1	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	Jumlah peserta sosialisasi pencegahan kebakaran Jumlah peralatan dan perlengkapan pemadam kebakaran yang sesuai dengan standar

TAHUN 2017			TAHUN 2018			TAHUN 2019		
Kode	Program / Kegiatan	Indikator	Kode	Program / Kegiatan	Indikator	Kode	Program / Kegiatan	Indikator
					Jumlah hydrant yang tersedia			Jumlah hydrant yang tersedia
								Jumlah hydrant yang terpelihara
	Kegiatan Pemasangan Hydrant Kawasan Padat Penduduk	Jumlah hydrant yang terpasang	-	-	-	-	-	-
	<b>Program Penertiban dan Penegakan Peraturan Perundangan Daerah</b>	<b>Jumlah pelanggaran perda yang tertangani sesuai prosedur</b>		<b>Program Penertiban dan Penegakan Peraturan Perundangan Daerah</b>	<b>Jumlah pelanggaran peraturan daerah</b>	1.05.1.05.01.07	<b>Program Penertiban dan Penegakan Peraturan Perundangan Daerah</b>	<b>Jumlah pelanggaran perda</b>
	Kegiatan Peningkatan Koordinasi Dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Jumlah koordinasi pelaksanaan penegakan perda	-	-	-	-	-	-
	Kegiatan Penertiban dan Penegakan Peraturan Daerah	Jumlah operasi penindakan non yustisi terhadap pelaku / obyek pelanggar perda		Kegiatan Penertiban dan Penegakan Peraturan Daerah	Jumlah laporan hasil operasi penindakan non yustisi terhadap pelaku / obyek pelanggar perda	1.05.1.05.01.07.03	Kegiatan Penertiban dan Penegakan Peraturan Daerah	Jumlah laporan hasil operasi penindakan non yustisi terhadap pelaku / obyek pelanggar perda

TAHUN 2017			TAHUN 2018			TAHUN 2019		
Kode	Program / Kegiatan	Indikator	Kode	Program / Kegiatan	Indikator	Kode	Program / Kegiatan	Indikator
								Jumlah laporan hasil penyelesaian dan penindakan pelanggaran perda
	Kegiatan Penyuluhan, penelitian dan pengembangan peraturan daerah	Jumlah kali sosialisasi produk hukum daerah pemerintah kota blitar		Kegiatan Penyuluhan, penelitian dan pengembangan peraturan daerah	Jumlah peserta sosialisasi produk hukum daerah	1.05.1.05.01.07.01	Kegiatan Penyuluhan, penelitian dan pengembangan peraturan daerah	Jumlah peserta sosialisasi produk hukum daerah terkait ketentraman dan ketertiban umum Jumlah peserta koordinasi penegakan perda dan perkara
	Kegiatan Penyelidikan dan pengawasan pelanggaran peraturan perundangan daerah	Jumlah penyelidikan dan pengawasan pelanggaran peraturan perundangan daerah		Kegiatan Penyelidikan dan pengawasan pelanggaran peraturan perundangan daerah	Jumlah laporan penyelidikan dan pengawasan pelanggaran peraturan perundangan daerah	1.05.1.05.01.07.02	Kegiatan Penyelidikan dan pengawasan pelanggaran peraturan perundangan daerah	Jumlah laporan penyelidikan dan pengawasan pelanggaran peraturan perundangan daerah oleh PPNS Jumlah anggota satpol pp yang mengikuti peningkatan kapasitas penegakan perda
					Jumlah aparaturnya satpol pp yang mengikuti peningkatan kapasitas			

Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan Tahun 2019 dapat dilihat dalam **Tabel 2.1** sebagai berikut.

**Tabel 2.1**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan**  
**Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019**  
**Kota Blitar**

Nama Perangkat Daerah : Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Urusan / Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program ( outcome ) / Kegiatan ( output )	Target Kinerja Capaian Program ( Renstra PD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target Program dan Kegiatan 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2020	
					Target Renja PD Tahun 2019	Realisasi Renja PD Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.05.01	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat									
1.05.01.01	PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN	Persentase kecukupan pelayanan perkantoran	100 %	96,34 %	100 %	91,64 %	91,64 %	100 %	100 %	100
1.05.01.01.01	Kegiatan Pengelolaan Administrasi Perkantoran	Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia	138 macam	143 macam	46 macam	46 macam	100 %	46 macam	235 macam	170,29
		Jumlah barang cetakan yang tersedia	18 cetakan	20 cetakan	6 cetakan	6 cetakan	100 %	6 cetakan	32 cetakan	177,78
		Jumlah lembar penggandaan	56040 lembar	18681 lembar	18680 lembar	18680 lembar	100 %	18680 lembar	56041 lembar	100
		Jumlah bahan bacaan yang tersedia	2 bahan bacaan	2 bahan bacaan	2 bahan bacaan	2 bahan bacaan	100 %	2 bahan bacaan	2 bahan bacaan	100

Kode	Urusan / Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program ( outcome ) / Kegiatan ( output )	Target Kinerja Capaian Program ( Renstra PD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target Program dan Kegiatan 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2020	
					Target Renja PD Tahun 2019	Realisasi Renja PD Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Jumlah dos/kotak makanan dan minuman yang tersedia	1020 dos	225 dos	456 dos	239 dos	52,41 %	456 dos	920 dos	90,20
		Jumlah porsi makanan minuman yang tersedia	300 porsi	300 porsi	-	-	0 %	-	300 porsi	100
1.05.01.01.02	Kegiatan Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Jumlah rapat – rapat koordinasi dan konsultasi regional dan nasional yang diikuti	111 rakor	107 rakor	37 rakor	49 rakor	132,43 %	37 rakor	193 rakor	173,87
1.05.01.01.03	Kegiatan Penyediaan Jasa Perkantoran	Jumlah iuran kebersihan yang terbayarkan	2 iuran	2 iuran	2 iuran	2 iuran	100 %	2 iuran	2 iuran	100
1.05.01.01.04	Kegiatan Penyusunan, Perencanaan, Pengelolaan dan Pelaporan Sarana Prasarana Perkantoran	Jumlah rekening yang terbayarkan	3 rekening	3 rekening	3 rekening	3 rekening	100 %	3 rekening	3 rekening	100
		Jumlah kendaraan dinas yang terbayarkan pajaknya	32 unit	24 unit	28 unit	28 unit	100 %	32 unit	32 unit	100

Kode	Urusan / Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program ( outcome ) / Kegiatan ( output )	Target Kinerja Capaian Program ( Renstra PD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target Program dan Kegiatan 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2020	
					Target Renja PD Tahun 2019	Realisasi Renja PD Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Jumlah jenis komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang tersedia	33 komponen	35 komponen	11 komponen	13 komponen	118,18 %	11 komponen	59 komponen	178,79
		Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang tersedia	72 macam	56 macam	24 macam	24 macam	100 %	24 macam	104 macam	144,44
		Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpenuhi	21 macam	1 macam	7 macam	10 macam	142,86 %	7 macam	18 macam	85,71
		Jumlah peralatan gedung kantor yang terpenuhi	30 macam	41 macam	10 macam	1 macam	10 %	10 macam	52 macam	173,33
		Jumlah perlengkapan bangunan gedung kantor yang terpelihara	6 macam	25 macam	2 macam	6 macam	300 %	2 macam	33 macam	550
		Jumlah peralatan bangunan gedung kantor yang terpelihara	30 macam	33 macam	10 macam	10 macam	100 %	10 macam	53 macam	176,67

Kode	Urusan / Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program ( outcome ) / Kegiatan ( output )	Target Kinerja Capaian Program ( Renstra PD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target Program dan Kegiatan 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2020	
					Target Renja PD Tahun 2019	Realisasi Renja PD Tahun 2019	Tingkat Realisasi ( % )		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra ( % )
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara	32 unit	28 unit	23 unit	24 unit	104,35 %	32 unit	32 unit	100
		Jumlah kendaraan dinas / operasional yang tersedia	4 unit	-	4 unit	-	0 %	-	-	0
		Jumlah bangunan gedung kantor yang terpelihara	6 unit	1 unit	2 unit	2 unit	100 %	1 unit	4 unit	66,67
<b>1.05.01.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PERANGKAT DAERAH</b>	<b>Tingkat partisipasi perangkat daerah dalam agenda kota</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100</b>	<b>100 %</b>	<b>99,22 %</b>	<b>99,22</b>
<b>1.05.01.02.01</b>	Kegiatan Pengelolaan Administrasi dan Kelengkapan Kepegawaian	Jumlah event daerah dan hari besar nasional yang diikuti	12 event	8 event	4 event	4 event	100 %	4 event	16 event	133,33
		Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang terpenuhi	102 macam	40 macam	34 macam	39 macam	114,71 %	34 macam	113 macam	110,78
		Jumlah pegawai yang mendapatkan fasilitasi pembinaan pegawai	162 orang	-	105 orang	105 orang	100 %	73 orang	178 orang	109,88

Kode	Urusan / Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program ( outcome ) / Kegiatan ( output )	Target Kinerja Capaian Program ( Renstra PD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target Program dan Kegiatan 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2020	
					Target Renja PD Tahun 2019	Realisasi Renja PD Tahun 2019	Tingkat Realisasi ( % )		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra ( % )
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.05.01.02.02	Kegiatan Pengelolaan Publikasi dan Informasi Perangkat Daerah	Jumlah publikasi program / kegiatan perangkat daerah	6 publikasi	4 publikasi	1 publikasi	1 publikasi	100	2 publikasi	7 publikasi	116,67
<b>1.05.01.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan OPD yang tersusun tepat waktu dan sesuai aturan</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100</b>	<b>100 %</b>	<b>99,22%</b>	<b>99,22</b>
		<b>Nilai SKM</b>	<b>Baik</b>	<b>Baik</b>	<b>Baik</b>	<b>Baik</b>		<b>Baik</b>	<b>Baik</b>	
1.05.01.03.01	Kegiatan Penyusunan dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun	21 dokumen	19 dokumen	7 dokumen	7 dokumen	100	7 dokumen	33 dokumen	157,14
<b>1.05.01.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KENYAMANAN LINGKUNGAN</b>	<b>Persentase poskamling aktif</b>	<b>75,01 %</b>	<b>80,45 %</b>	<b>73,01 %</b>	<b>70,49 %</b>	<b>96,55</b>	<b>73,87 %</b>	<b>73,87 %</b>	<b>98,48</b>
		<b>Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang tertangani sesuai prosedur</b>	<b>86,34 %</b>	<b>91,01 %</b>	<b>80,82 %</b>	<b>91,86 %</b>	<b>113,66</b>	<b>84,60 %</b>	<b>84,60 %</b>	<b>97,98</b>

Kode	Urusan / Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program ( outcome ) / Kegiatan ( output )	Target Kinerja Capaian Program ( Renstra PD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target Program dan Kegiatan 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2020	
					Target Renja PD Tahun 2019	Realisasi Renja PD Tahun 2019	Tingkat Realisasi ( % )		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra ( % )
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.05.01.05.01	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparat Satuan Perlindungan Masyarakat	Jumlah peserta pelatihan tanggap darurat	450 orang	300 orang	150 orang	150 orang	100	150 orang	450 orang	100
		Jumlah laporan hasil patroli wilayah terkait ketertiban umum	63 laporan	64 laporan	21 laporan	19 laporan	90,48	63 laporan	63 laporan	100
		Jumlah anggota linmas yang terlibat dalam kegiatan Satpol PP	2409 orang	1149 orang	1157 orang	1157 orang	100	2409 orang	2409 orang	100
1.05.01.05.02	Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah lokasi gedung pemkot Blitar yang diamankan	29 lokasi	29 lokasi	38 lokasi	36 lokasi	94,74	38 lokasi	38 lokasi	131,03
		Jumlah laporan pengamanan lokasi kegiatan pemerintah daerah dan pejabat negara	210 laporan	473 laporan	90 laporan	81 laporan	90	79 laporan	633 laporan	301,43
		Jumlah laporan patroli penanganan gangguan ketertiban umum secara preventif dan preventif	144 laporan	65 laporan	48 laporan	43 laporan	89,58	48 laporan	156 laporan	108,33

Kode	Urusan / Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program ( outcome ) / Kegiatan ( output )	Target Kinerja Capaian Program ( Renstra PD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target Program dan Kegiatan 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2020	
					Target Renja PD Tahun 2019	Realisasi Renja PD Tahun 2019	Tingkat Realisasi ( % )		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra ( % )
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.05.01.05.03	Kegiatan Pengendalian, Operasional dan Penanganan Gangguan Ketertiban Umum	Jumlah laporan hasil operasi gabungan penanganan gangguan ketertiban umum secara represif non yustisi	72 laporan	22 laporan	24 laporan	20 laporan	83,33	24 laporan	66 laporan	91,67
		Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan terkait Polisi Pamong Praja	177 orang	169 orang	57 orang	57 orang	100	56 orang	282 orang	159,22
<b>1.05.01.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN</b>	<b>Persentase korban kebakaran yang tertangani</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100</b>
1.05.01.06.01	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	Jumlah peserta sosialisasi pencegahan kebakaran	600 orang	17 orang	200 orang	200 orang	100	200 orang	417 orang	69,5
		Jumlah peralatan dan perlengkapan pemadam kebakaran yang sesuai dengan standar	15 macam	5 macam	5 macam	5 macam	100	3 macam	13 macam	86,67

Kode	Urusan / Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program ( outcome ) / Kegiatan ( output )	Target Kinerja Capaian Program ( Renstra PD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target Program dan Kegiatan 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2020	
					Target Renja PD Tahun 2019	Realisasi Renja PD Tahun 2019	Tingkat Realisasi ( % )		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra ( % )
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Jumlah hydrant yang tersedia	24 unit	16 unit	8 unit	-	-	-	16 unit	66,67
		Jumlah hydrant yang terpelihara	45 unit	-	21 unit	19 unit	90,48	24 unit	43 unit	95,56
		Jumlah unit mobil damkar yang terpelihara	5 unit	-	5 unit	5 unit	100	-	5 unit	100,00
		Jumlah pakaian tahan api yang tersedia	4 unit	-	4 unit	0	0	-	-	-
<b>1.05.01.07</b>	<b>PROGRAM PENERTIBAN DAN PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANGAN DAERAH</b>	<b>Jumlah pelanggaran peraturan daerah</b>	<b>448 pelanggaran</b>	<b>480 pelanggaran</b>	<b>458 pelanggaran</b>	<b>457 pelanggaran</b>	<b>99,78</b>	<b>451 pelanggaran</b>	<b>451</b>	<b>100,67</b>
1.05.01.07.01	Kegiatan Penyuluhan dan Pengembangan Penegakan Peraturan Daerah	Jumlah peserta sosialisasi produk hukum daerah terkait ketentraman dan ketertiban umum	1590 orang	523 orang	530 orang	750 orang	141,51	530 orang	1280 orang	80,50
		Jumlah peserta koordinasi penegakan Perda dan Perkada	240 orang	-	80 orang	85 orang	106,25	80 orang	165 orang	68,75

Kode	Urusan / Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program ( outcome ) / Kegiatan ( output )	Target Kinerja Capaian Program ( Renstra PD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target Program dan Kegiatan 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2020	
					Target Renja PD Tahun 2019	Realisasi Renja PD Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.05.01.07.02	Kegiatan Penyelidikan dan Pengawasan Pelanggaran Peraturan Perundangan Daerah	Jumlah laporan penyelidikan dan pengawasan pelanggaran peraturan perundangan daerah oleh PPNS	72 laporan	8 laporan	24 laporan	18 laporan	75	24 laporan	42 laporan	58,33
		Jumlah anggota Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas penegakan Perda	162 orang	7 orang	54 orang	54 orang	100	54 orang	108 orang	66,67
1.05.01.07.03	Kegiatan Penertiban dan Penegakan Peraturan Daerah	Jumlah laporan hasil operasi penindakan non yustisi terhadap pelaku / obyek pelanggar Perda	72 laporan	96 laporan	24 laporan	24 laporan	100	24 laporan	48 laporan	66,67
		Jumlah laporan hasil penyelesaian dan penindakan pelanggaran Perda	72 laporan	-	24 laporan	25 laporan	104,17	24 laporan	48 laporan	66,67

Program dan Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan pada tahun 2019 dapat dilihat dalam tabel berikut.

No	Nama Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	91,64%	91,64%
2.	Program Peningkatan Kapasitas Perangkat Daerah	100 %	97,67%	97,67%
3.	Program Penertiban dan Penegakan Peraturan Perundangan Daerah	458 pelanggaran	457 pelanggaran	99,78%
4.	Program Peningkatan Kenyamanan Lingkungan	73,01 %	70,49 %	99,68 %
5.	Kegiatan Pengelolaan Administrasi Perkantoran	47 macam	46 macam	97,87 %
		456 dos	239 dos	52,41 %
6.	Kegiatan Penyusunan Perencanaan, Pengelolaan dan Pelaporan Sarana Prasarana Perkantoran	11 macam	10 macam	90,91 %
7.	Kegiatan Penyusunan dan Pelaporan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah	5 dokumen	4 dokumen	80 %
8.	Kegiatan Pengelolaan Administrasi dan Kelengkapan Kepegawaian	43 macam	39 macam	90,70 %
9.	Kegiatan Penyelidikan dan Pengawasan Pelanggaran Peraturan Perundangan Daerah	24 laporan	18 laporan	75 %
10.	Kegiatan Penertiban dan Penegakan Peraturan Daerah	45 laporan	24 laporan	53,33 %
11.	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparat Satuan Perlindungan Masyarakat	21 laporan	19 laporan	90,48 %
12.	Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum	38 lokasi	36 lokasi	94,74 %
		48 laporan	43 laporan	89,58 %

No	Nama Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
13.	Kegiatan Pengendalian, Operasional dan Penanganan Gangguan Ketertiban Umum	24 laporan	20 laporan	83,33 %
14.	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	8 unit	0 unit	0 %
		21 unit	19 unit	90,48 %

Adapun faktor – faktor yang menjadi penyebab tidak tercapainya target kinerja program / kegiatan adalah sebagai berikut.

1. Keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga akibatnya target tidak dapat tercapai sesuai dengan yang direncanakan.
2. Jumlah peserta yang hadir sosialisasi tidak sesuai dengan jumlah undangan.
3. Belum adanya peraturan walikota tentang pelaksanaan Perda No 1 tahun 2017.

Program dan Kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan pada tahun 2019 dapat dilihat dalam tabel berikut :

No	Nama Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
1.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %
2.	Program Peningkatan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	100 %	100 %	100 %
3.	Kegiatan Pengelolaan Administrasi Perkantoran	6 cetakan	6 cetakan	100 %
		18680 lembar	18680 lembar	100 %
		2 bahan bacaan	2 bahan bacaan	100 %

No	Nama Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
4.	Kegiatan Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	49 rakor	49 rakor	100 %
5.	Kegiatan Penyediaan Jasa Perkantoran	2 iuran	2 iuran	100 %
7.	Kegiatan Penyusunan Perencanaan, Pengelolaan dan Pelaporan Sarana Prasarana Perkantoran	3 rekening	3 rekening	100 %
		28 unit	28 unit	100 %
		13 komponen	13 komponen	100 %
		24 macam	24 macam	100 %
		11 macam	11 macam	100 %
		2 macam	2 macam	100 %
		10 macam	10 macam	100 %
		24 unit	24 unit	100 %
2 unit	2 unit	100 %		
8.	Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan	4 dokumen	4 dokumen	100 %
9.	Kegiatan Pengelolaan Administrasi dan Kelengkapan Kepegawaian	4 event	4 event	100 %
		105 orang	105 orang	100 %
10.	Kegiatan Pengelolaan Publikasi dan Informasi Perangkat Daerah	1 publikasi	1 publikasi	100 %
11.	Kegiatan Penyusunan dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	7 dokumen	7 dokumen	100 %

Adapun faktor – faktor yang menjadi penyebab tercapainya target kinerja program / kegiatan adalah sebagai berikut.

1. Kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan.
2. Target yang telah direncanakan sudah tepat.

Adapun Program dan Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan pada tahun 2019 dapat dilihat dalam tabel berikut.

No	Nama Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
1.	Program Peningkatan Kenyamanan Lingkungan	80,82%	91,86 %	113,65 %
2.	Kegiatan Penyuluhan dan Pengembangan Penegakan Peraturan Daerah	80 orang	85 orang	106,25 %
3.	Kegiatan Penertiban dan Penegakan Peraturan Daerah	24 laporan	25 laporan	104,17 %

Faktor – faktor yang menyebabkan melebihi target kinerja program / kegiatan adalah :

1. Adanya efisiensi anggaran dalam pelaksanaan kegiatan.
2. Ketaatan terhadap jadwal pelaksanaan kegiatan.

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai berikut:

1. Terhadap program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai Renstra Satuan Polisi Pamong Praja, tahun 2020 berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran pada khususnya dan kepada masyarakat pada umumnya
2. Terhadap program yang realisasinya belum memenuhi target sesuai Renstra Satuan Polisi Pamong Praja berdampak pada laporan kinerja dan realisasi keuangan Satuan Polisi Pamong Praja

Adapun kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor – faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program / kegiatan adalah sebagai berikut.

1. Kegiatan harus dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan atau perbaikan perencanaan pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada.
2. Dalam perencanaan dan penganggaran harus benar – benar diperhitungkan dengan seksama.

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pengemban pelayanan dasar di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, mempunyai tanggung jawab untuk mewujudkan Standar

Pelayanan Minimal ( SPM ) dengan indikator yang harus diukur adalah sebagai berikut sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018.

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan dari akibat penegakan hukum Perda dan Perkada	100 %	Setiap tahun
2	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100 %	Setiap tahun

Untuk pelayanan kinerja perangkat daerah yang diukur masih menggunakan Standar Pelayanan Minimal yang lama yaitu yang sesuai dengan Permendagri Nomor 69 Tahun 2012, dengan indikator sebagai berikut.

JENIS PELAYANAN DASAR		INDIKATOR SPM	TARGET NASIONAL	
1. Pemeliharaan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat	1	Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah kabupaten / kota	100 %	2015
	2	Patroli siaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	3 x sehari dalam satu wilayah kecamatan	2014
	3	Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat di kabupaten / kota	1 orang setiap RT atau sebutan lainnya	2014
2. Pelayanan Penanggulangan Bencana Kebakaran	1	Cakupan pelayanan bencana kebakaran di kabupaten / kota	80 %	2015
	2	Tingkat waktu tanggap ( response time rate ) daerah layanan WMK	75 %	2015

JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR SPM		TARGET NASIONAL	
	3	Persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi	85 %	2015
	4	Jumlah mobil pemadam kebakaran di atas 3000 – 5000 liter pada WMK	90 %	2015

Pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah dapat ditunjukkan dalam tabel 2.2 sebagai berikut.

**Tabel 2.2**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Sesuai Permendagri Nomor 69 tahun 2012**  
**Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar**

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah kabupaten / kota	100 % pada tahun 2015	-	-	-	-	-	57,53 %	85,63 %	90,42 %	91,95%		-
2	Patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	3 x sehari dalam satu wilayah kecamatan tahun 2014	-	-	-	-	-	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	-
3	Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat di kabupaten / kota	1 orang setiap RT atau sebutan lainnya tahun 2014	-	-	-	-	-	0,23 / RT atau sebutan lainnya	0,46 / RT atau sebutan lainnya	0,64 / RT atau sebutan lainnya	0,82 / RT atau sebutan lainnya	1 / RT atau sebutan lainnya	-
4	Cakupan pelayanan bencana kebakaran di kabupaten / kota	80 % pada tahun 2015	-	-	-	-	-	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	-
5	Tingkat waktu tanggap ( response time rate ) daerah layanan WMK	75 % pada tahun 2015	-	-	-	-	-	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
6	Persentase aparaturnya pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi	85 % pada tahun 2015	-	-	-	-	-	15,79 %	10,53 %	21,05 %	26,31 %	26,31 %	
7	Jumlah mobil pemadam kebakaran di atas 3000 – 5000 liter pada WMK	90 % pada tahun 2015	-	-	-	-	-	300 %	300 %	300 %	300 %	300 %	
8	Persentase penurunan jumlah pelanggaran perda	-	-	18 %	8,97 %	3,98 %	1,53 %	17,99 %	8,40 %	3,98 %	1,53 %	0,67 %	
9	Persentase penurunan jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban umum	-	-	24,57 %	14,63 %	7,74 %	3,78 %	22,38 %	40,35 %	7,74 %	3,78 %	1,74 %	
10	Rasio petugas perlindungan masyarakat di kabupaten / kota	-	-	0,23	0,46	0,64	0,82	0,23	0,46	0,64	0,82	1,00	
11	Persentase respon penanggulangan kebakaran yang sesuai SOP, SPP, SPM	-	-	78 %	78 %	79 %	80 %	100 %	100 %	79 %	80 %	85 %	

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
12	Persentase pelanggaran peraturan daerah yang tertangani sesuai prosedur	-	-	77,47 %	86,44 %	90,42 %	91,95 %	59,35 %	85,63 %	90,42 %	91,95 %	92,61 %	
13	Jumlah pelanggaran peraturan daerah	-	-	524 pelanggaran	477 pelanggaran	458 pelanggaran	451 pelanggaran	524 pelanggaran	480 pelanggaran	458 pelanggaran	451 pelanggaran	448 pelanggaran	
14	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang tertangani sesuai prosedur	-	-	58,45 %	73,08 %	80,82 %	84,60 %	62,38 %	91,01 %	80,82 %	84,60 %	86,34 %	
15	Persentase poskamling aktif	-	-	71,57 %	72,15 %	73,01 %	73,87 %	73,64 %	80,45 %	73,01 %	73,87 %	75,01 %	
16	Persentase korban kebakaran yang tertangani	-	-	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	

**Tabel 2.2.1**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Sesuai Permendagri Nomor 100 Tahun 2020**  
**Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator dan Nilai SPM	Target Nasional	Target Daerah			Realisasi Target Daerah	Proyeksi	
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
1	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Dari indikator Standar Pelayanan Minimal ( SPM ) tersebut di atas, sesuai Permendagri Nomor 100 tahun 2020 ada 2 indikator yang harus dicapai yaitu sebagai berikut.

1. Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada
2. Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran

Dalam RPJMD Kota Blitar Tahun 2016 – 2021, Satuan Polisi Pamong Praja mendukung **Misi ke 5** “ Meningkatkan Keharmonisan Sosial dengan Semangat Rukun Agawe Santoso “, **Tujuan ke 1** “ Meningkatkan tata kehidupan masyarakat yang tertib “, **Sasaran ke 1** “ Terciptanya situasi kondisi masyarakat yang tertib “ dengan indikator “ Prosentase kasus kriminalitas yang tertangani “. Apabila target kinerja tidak tercapai maka indikator kinerja daerah tidak tercapai, karena pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja berpengaruh terhadap pencapaian kinerja Pemerintah Kota Blitar. Oleh sebab itu dibutuhkan komitmen dan kerja keras dari seluruh elemen Satuan Polisi Pamong Praja untuk mencapai target tersebut.

### 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

#### a. Permasalahan dan Hambatan Yang Dihadapi Dalam Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Permasalahan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah sebagai berikut.

- ❖ Masih tingginya angka pelanggaran perda di Kota Blitar;
- ❖ Masih tingginya gangguan ketentraman dan ketertiban umum di Kota Blitar ;

Sedangkan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah sebagai berikut.

- ❖ Keterbatasan jumlah personil Satuan Polisi Pamong Praja ;
- ❖ Keterbatasan jumlah PPNS Penegak Perda yang memiliki sertifikasi ;
- ❖ Belum memadainya kebijakan sistem dan prosedur terkait pelaksanaan kegiatan di lapangan ;

- ❖ Meningkatnya permasalahan pada masyarakat perkotaan baik kuantitas maupun kualitasnya .

#### **b. Tantangan dan Peluang Dalam Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah**

Tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah adalah sebagai berikut.

- ❖ Potensi kerawanan ketertiban umum semakin meningkat sejalan dengan perkembangan perkotaan ;
- ❖ Sanksi yang tertuang di dalam pasal Perda belum dapat ditegakkan secara paripurna ;
- ❖ Kesadaran masyarakat tentang kepatuhan terhadap Perda dan Perwali belum optimal ;
- ❖ Dinamika masyarakat yang semakin kompleks ;
- ❖ Penegakan peraturan daerah terkait dengan pelanggaran lingkungan hidup dan tata ruang yang masih berpotensi menimbulkan konflik sosial horisontal ;
- ❖ Adanya interpretasi yang berbeda terhadap penegakan Perda ;
- ❖ Koordinasi antara Perangkat Daerah terkait belum berjalan secara optimal .

Adapun peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah adalah sebagai berikut.

- ❖ Kewenangan dan peran Satuan Polisi Pamong Praja yang semakin kuat dan luas dalam penegakan perda, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat ;
- ❖ Kepercayaan masyarakat yang mulai muncul terhadap Satuan Polisi Pamong Praja sebagai penyelenggara ketentraman dan ketertiban umum ;
- ❖ Keberadaan anggota perlindungan masyarakat ( linmas ) yang dapat diberdayakan dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban umum di lingkungan tempat tinggalnya ;
- ❖ Ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 100 tahun 2018 tentang *Penerapan Standar Pelayanan Minimal*,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 *tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten / Kota* dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 *tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman Dan Ketertiban Umum DI Provinsi Dan Kabupaten/Kota*.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar tidak dapat terlepas dari isu – isu strategis yang melingkupinya. Isu – isu strategis yang dimaksud antara lain :

1. Masih tingginya angka pelanggaran perda di Kota Blitar
2. Sanksi yang tertuang di dalam pasal Perda belum dapat ditegakkan secara paripurna
3. Potensi kerawanan ketertiban umum semakin meningkat sejalan dengan perkembangan perkotaan
4. Koordinasi dan sinkronisasi antar OPD belum optimal
5. Masih tingginya gangguan ketentraman dan ketertiban umum
6. Ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 *tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten / Kota* dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 *tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman Dan Ketertiban Umum DI Provinsi Dan Kabupaten/Kota*.
7. Pembentukan Satuan Relawan Kebakaran yang merupakan amanat Permendagri No 114 tahun 2018.

Terkait dengan isu – isu strategis di atas, hal – hal yang perlu ditindaklanjuti dalam program dan kegiatan prioritas Tahun 2021 adalah sebagai berikut.

1. Dalam penegakan perda dan perkada direncanakan dengan baik dan pelaksanaan kegiatan lebih taat jadwal .
2. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang Perda dan Perkada yang berlaku.
3. Menambah volume kegiatan patroli ketentraman dan ketertiban umum agar bisa menjangkau seluruh wilayah Kota Blitar.

4. Mengoptimalkan koordinasi antara perangkat daerah .
5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam fungsi perlindungan masyarakat melalui kegiatan – kegiatan yang melibatkan peran Satuan Perlindungan Masyarakat.
6. Mengoptimalkan pencapaian Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 tahun 2018 *tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal*, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 *tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten / Kota* dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 *tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota*

#### 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 telah menentukan 5 (lima) Prioritas Pembangunan Daerah, yaitu :

1. Pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas kesejahteraan sosial masyarakat
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui kesehatan, pendidikan dan kebudayaan;
3. Peningkatan nilai tambah ekonomi untuk mendorong pertumbuhan;
4. Peningkatan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan dengan mempertimbangkan pengurangan risiko bencana;
5. Stabilitas keamanan dan ketertiban serta reformasi birokrasi dalam pelayanan publik;

**Dengan Fokus :**

1. Percepatan realisasi kinerja daerah guna terwujudnya visi pembangunan Kota Blitar ; dan
2. Pemulihan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat sebagai dampak bencana nasional COVID-19.

Sehubungan dengan hal dimaksud, dalam rangka meningkatkan kualitas ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat

di wilayah Kota Blitar ,maka Satuan Polisi Pamong Praja melakukan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan prioritas pembangunan yang telah di tetapkan sebagaimana dalam ***Tabel 2.4*** sebagai berikut .

**Tabel 2.4**  
**Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021**  
**Kota Blitar**

Nama Perangkat Daerah : Satuan Polisi Pamong Praja

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif ( Rp )	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana ( Rp )	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
I.	<b>Program Pelayanan Perkantoran</b>	<b>Kota Blitar</b>	<b>Persentase kecukupan pelayanan perkantoran</b>	<b>100 %</b>	<b>748.180.684,12,-</b>	<b>Program Pelayanan Perkantoran</b>	<b>Kota Blitar</b>	<b>Persentase kecukupan pelayanan perkantoran</b>	<b>100 %</b>	<b>573.565.415,00,-</b>	
1.	Kegiatan Pengelolaan Administrasi Perkantoran	Kota Blitar	Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia	46 macam	54.109.101,37,-	Kegiatan Pengelolaan Administrasi Perkantoran	Kota Blitar	Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia	46 macam	28.384.294,-	
			Jumlah barang cetakan yang tersedia	6 cetakan				Jumlah barang cetakan yang tersedia	6 cetakan		
			Jumlah lembar penggandaan	18680 lembar				Jumlah lembar penggandaan	18680 lembar		
			Jumlah bahan bacaan yang tersedia	2 bahan bacaan				Jumlah bahan bacaan yang tersedia	2 bahan bacaan		
			Jumlah dos/kotak makanan dan minuman yang tersedia	340 dos				Jumlah dos/kotak makanan dan minuman yang tersedia	340 dos		
			Jumlah porsi makanan minuman yang tersedia	100 porsi				Jumlah porsi makanan minuman yang tersedia	100 porsi		
2.	Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Kota Blitar	Jumlah rapat rapat koordinasi dan konsultasi regional dan nasional yang diikuti	37 rakor	187.425.000,-	Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Kota Blitar	Jumlah rapat rapat koordinasi dan konsultasi regional dan nasional yang diikuti	37 rakor	162.192.100,-	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3.	Kegiatan Penyediaan Jasa Perkantoran	Kota Blitar	Jumlah iuran kebersihan yang terbayarkan	2 iuran	1.323.000,-	Kegiatan Penyediaan Jasa Perkantoran	Kota Blitar	Jumlah iuran kebersihan yang terbayarkan	2 iuran	1.320.000,-	
4.	Kegiatan Penyusunan Perencanaan, Pengelolaan Dan Pelaporan Sarana Prasarana Perkantoran	Kota Blitar	Jumlah rekening yang terbayarkan	3 rekening	503.401.500,-	Kegiatan Penyusunan Perencanaan, Pengelolaan Dan Pelaporan Sarana Prasarana Perkantoran	Kota Blitar	Jumlah rekening yang terbayarkan	3 rekening	380.249.721,00,-	
			Jumlah kendaraan dinas yang terbayarkan pajaknya	32 unit				Jumlah kendaraan dinas yang terbayarkan pajaknya	32 unit		
			Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	11 komponen				Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	11 komponen		
			Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang tersedia	24 macam				Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang tersedia	24 macam		
			Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpenuhi	7 macam				Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpenuhi	-		
			Jumlah peralatan gedung kantor yang terpenuhi	10 macam				Jumlah peralatan gedung kantor yang terpenuhi	-		
			Jumlah perlengkapan bangunan kantor yang terpelihara	2 macam				Jumlah perlengkapan bangunan kantor yang terpelihara	2 macam		
			Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	10 macam				Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	10 macam		
			Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	32 unit				Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	32 unit		
			Jumlah kendaraan dinas/operasional yang tersedia	2 unit				Jumlah kendaraan dinas/operasional yang tersedia	-		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Jumlah bangunan kantor yang terpelihara	2 unit				Jumlah bangunan kantor yang terpelihara	2 unit		
5.	Kegiatan Penyusunan Dan Pelaporan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah	Kota Blitar	Jumlah jenis dokumen ketatalaksanaan yang tersusun	6 dokumen	914.082,75,-	Kegiatan Penyusunan Dan Pelaporan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah	Kota Blitar	Jumlah jenis dokumen ketatalaksanaan yang tersusun	6 dokumen	505.800,-	
6.	Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan	Kota Blitar	Jumlah jenis dokumen laporan keuangan yang tersusun	4 dokumen	1.008.000,-	Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan	Kota Blitar	Jumlah jenis dokumen laporan keuangan yang tersusun	4 dokumen	913.500,-	
<b>II.</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Perangkat Daerah</b>	<b>Kota Blitar</b>	<b>Tingkat partisipasi aktif perangkat daerah dalam agenda pemda kota blitar</b>	<b>100 %</b>	<b>207.224.084,79,-</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Perangkat Daerah</b>	<b>Kota Blitar</b>	<b>Tingkat partisipasi aktif perangkat daerah dalam agenda pemda kota blitar</b>	<b>100 %</b>	<b>134.117.020,-</b>	
1.	Kegiatan Pengelolaan Administrasi Dan Kelengkapan Kepegawaian	Kota Blitar	Jumlah event daerah dan hari besar nasional yang diikuti	4 event	191.789.084,79,-	Kegiatan Pengelolaan Administrasi Dan Kelengkapan Kepegawaian	Kota Blitar	Jumlah event daerah dan hari besar nasional yang diikuti	4 event	126.782.020,-	
Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang terpenuhi			34 macam	Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang terpenuhi				34 macam			
Jumlah pegawai yang mendapatkan fasilitasi pembinaan pegawai			54 orang	Jumlah pegawai yang mendapatkan fasilitasi pembinaan pegawai				54 orang			
2.	Kegiatan Pengelolaan Publikasi dan Informasi Perangkat Daerah	Kota Blitar	Jumlah publikasi program/kegiatan perangkat daerah	2 publikasi	15.435.000,-	Kegiatan Pengelolaan publikasi dan informasi Perangkat Daerah	Kota Blitar	Jumlah publikasi program/kegiatan perangkat daerah	2 publikasi	7.335.000,-	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
III.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Kota Blitar	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan perangkat daerah tersusun tepat waktu dan sesuai aturan	100 %	22.534.898,30,-	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Kota Blitar	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan perangkat daerah tersusun tepat waktu dan sesuai aturan	100 %	3.041.000,-	
			Nilai SKM	Baik				Nilai SKM	Baik		
1.	Kegiatan Penyusunan Dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Kota Blitar	Jumlah jenis dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun	7 dokumen	22.534.898,30,-	Kegiatan Penyusunan Dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Kota Blitar	Jumlah jenis dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun	7 dokumen	3.041.000,-	
IV.	Program Peningkatan Kenyamanan Lingkungan	Kota Blitar	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang tertangani sesuai prosedur	86,34%	6.135.949.871,81,-	Program Peningkatan Kenyamanan Lingkungan	Kota Blitar	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang tertangani sesuai prosedur	86,34%	11.004.024.003,-	
			Persentase poskamling aktif	75,01%				Persentase poskamling aktif	73,87%		
1.	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparat Satuan Perlindungan Masyarakat	Kota Blitar	Jumlah peserta pelatihan tanggap darurat	150 orang	291.326.445.81,-	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparat Satuan Perlindungan Masyarakat	Kota Blitar	Jumlah peserta pelatihan tanggap darurat	-	952.144.250,-	
			Jumlah laporan hasil patroli wilayah terkait ketertiban umum	21 laporan				Jumlah laporan hasil patroli wilayah terkait ketertiban umum	-		
			Jumlah anggota Linmas yang terlibat dalam kegiatan Satpol PP	803 orang				Jumlah anggota Linmas yang terlibat dalam kegiatan Satpol PP	-		
								Jumlah laporan hasil patroli wilayah terkait ketertiban umum	21 laporan		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
								Jumlah anggota Linmas yang terlibat dalam kegiatan Satpol PP	803 orang		
2.	Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kota Blitar	Jumlah lokasi gedung pemkot blitar yang diamankan	21 lokasi	5.653.531.921,00,-	Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kota Blitar	Jumlah lokasi gedung pemkot blitar yang diamankan	21 lokasi	9.912.541.353,-	
		Jumlah laporan pengamanan lokasi kegiatan pemerintah daerah dan pejabat negara	70 laporan	Jumlah laporan pengamanan lokasi kegiatan pemerintah daerah dan pejabat negara				70 laporan			
		Jumlah laporan patroli penanganan gangguan ketertiban umum preemtif dan preventif	48 laporan	Jumlah laporan patroli penanganan gangguan ketertiban umum preemtif dan preventif				48 laporan			
3.	Kegiatan Pengendalian, Operasional dan Penanganan Gangguan Ketertiban Umum	Kota Blitar	Jumlah laporan hasil operasi gabungan penanganan gangguan ketertiban umum secara represif non yustisi	24 laporan	209.091.505,-	Kegiatan Pengendalian, Operasional dan Penanganan Gangguan Ketertiban Umum	Kota Blitar	Jumlah laporan hasil operasi gabungan penanganan gangguan ketertiban umum secara represif non yustisi	24 laporan	139.338.400,-	
		Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan terkait Polisi Pamong Praja	59 orang	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan terkait Polisi Pamong Praja				59 orang			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
V.	<b>Program Peningkatan Pencegahan Dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran</b>	<b>Kota Blitar</b>	<b>Persentase korban kebakaran yang tertangani</b>	<b>100 %</b>	<b>862.800.412,07,-</b>	<b>Program Peningkatan Pencegahan Dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran</b>	<b>Kota Blitar</b>	<b>Persentase korban kebakaran yang tertangani</b>	<b>100 %</b>	<b>538.937.200,-</b>	
1.	Kegiatan Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran	Kota Blitar	Jumlah peserta sosialisasi pencegahan kebakaran	200 orang	862.800.412,07,-	Kegiatan Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran	Kota Blitar	Jumlah peserta sosialisasi pencegahan kebakaran	200 orang	538.937.200,-	
		Jumlah peralatan dan perlengkapan pemadam kebakaran yang sesuai dengan standar	5 macam	Jumlah peralatan dan perlengkapan pemadam kebakaran yang sesuai dengan standar				5 macam			
		Jumlah hydrant yang tersedia	8 unit	Jumlah hydrant yang tersedia				-			
		Jumlah hydrant yang terpelihara	21 unit	Jumlah hydrant yang terpelihara				21 unit			
VI.	<b>Program Penertiban dan Penegakan Peraturan Perundangan Daerah</b>	<b>Kota Blitar</b>	<b>Jumlah pelanggaran peraturan daerah</b>	<b>448 pelanggaran</b>	<b>328.943.769,77,-</b>	<b>Program Penertiban dan Penegakan Peraturan Perundangan Daerah</b>	<b>Kota Blitar</b>	<b>Jumlah pelanggaran perda</b>	<b>448</b>	<b>253.400.850,-</b>	
1.	Kegiatan Penyuluhan dan Pengembangan Penegakan Peraturan Daerah	Kota Blitar	Jumlah peserta sosialisasi produk hukum daerah terkait ketertiban dan ketertiban umum	530 orang	89.851.214,25,-	Kegiatan Penyuluhan dan Pengembangan Penegakan Peraturan Daerah	Kota Blitar	Jumlah peserta sosialisasi produk hukum daerah terkait ketertiban dan ketertiban umum	530 orang	85.920.020,-	
		Jumlah peserta koordinasi penegakan perda dan perkara	80 orang	Jumlah peserta koordinasi penegakan perda dan perkara				80 orang			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.	Kegiatan Penyelidikan dan Pengawasan Pelanggaran Peraturan Perundangan Daerah	Kota Blitar	Jumlah laporan penyelidikan dan pengawasan pelanggaran peraturan perundangan daerah oleh PPNS	24 laporan	36.734.969,25,-	Kegiatan Penyelidikan dan Pengawasan Pelanggaran Peraturan Perundangan Daerah	Kota Blitar	Jumlah laporan penyelidikan dan pengawasan pelanggaran peraturan perundangan daerah oleh PPNS	24 laporan	37.893.080,-	
			Jumlah anggota Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas penegakan PERDA	54 orang				Jumlah anggota Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas penegakan PERDA	54 orang		
3.	Kegiatan Penertiban dan Penegakan Peraturan Daerah	Kota Blitar	Jumlah laporan hasil operasi penindakan non yustisi terhadap pelaku/obyek pelanggar perda	24 laporan	202.357.586,27,-	Kegiatan Penertiban dan Penegakan Peraturan Daerah	Kota Blitar	Jumlah laporan hasil operasi penindakan non yustisi terhadap pelaku/obyek pelanggar perda	24 laporan	129.587.750,-	
			Jumlah laporan hasil penyelesaian, dan penindakan pelanggaran Perda	24 laporan				Jumlah laporan hasil penyelesaian, dan penindakan pelanggaran Perda	24 laporan		

## 2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja juga berasal dari para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat, LSM, perguruan tinggi, maupun Perangkat Daerah dalam hal pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

Berdasarkan hasil Musrenbang tingkat kecamatan ada beberapa kegiatan yang menjadi skala prioritas usulan kegiatan pembangunan pada tahun 2021. Sebagian usulan tersebut sudah diakomodir dalam rencana kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar Tahun 2021, tetapi besaran anggaran disesuaikan dengan kemampuan OPD. Usulan kegiatan dari hasil Musrenbang tingkat kecamatan yang berhubungan langsung dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dalam **Tabel 2.5** berikut .

**Tabel 2.5**  
**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2021**  
**Kota Blitar**

Nama Perangkat Daerah : Satuan Polisi Pamong Praja

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	Kelurahan Karang Sari	Jumlah peralatan dan perlengkapan pemadam kebakaran yang sesuai dengan standar	5 macam	Diakomodir tetapi untuk kuantitas sesuai dengan jumlah anggaran yang ada
2.	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	Kelurahan Tanggung	Jumlah peralatan dan perlengkapan pemadam kebakaran yang sesuai dengan standar	5 macam	
3.	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	Kelurahan Blitar	Jumlah peserta sosialisasi pencegahan kebakaran	200 orang	
4.	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	Kelurahan Turi	Jumlah peserta sosialisasi pencegahan kebakaran	200 orang	
5.	Kegiatan Penyuluhan dan Pengembangan Penegakan Peraturan Daerah	RT.02/ RW.02	Jumlah peserta sosialisasi produk hukum daerah terkait ketentraman dan ketertiban umum	530 orang	

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6.	Kegiatan Penyuluhan dan Pengembangan Penegakan Peraturan Daerah	Kelurahan Pakunden	Jumlah peserta sosialisasi produk hukum daerah terkait ketentraman dan ketertiban umum	530 orang	Diakomodir tetapi untuk kuantitas sesuai dengan jumlah anggaran yang ada
7.	Kegiatan Penyuluhan dan Pengembangan Penegakan Peraturan Daerah	Kelurahan Sananwetan	Jumlah peserta sosialisasi produk hukum daerah terkait ketentraman dan ketertiban umum	530 orang	
8.	Kegiatan Penertiban dan Penegakan Peraturan Daerah	RW 01, RW 02, RW 03 Dan RW 04	Jumlah laporan hasil operasi penindakan non yustisi terhadap pelaku/obyek pelanggar perda	24 Laporan	
			Jumlah laporan hasil penyelesaian, dan penindakan pelanggaran Perda	24 Laporan	
9.	Kegiatan Penertiban dan Penegakan Peraturan Daerah	Jl. Teratai RW 4	Jumlah laporan hasil operasi penindakan non yustisi terhadap pelaku/obyek pelanggar perda	24 Laporan	
			Jumlah laporan hasil penyelesaian, dan penindakan pelanggaran Perda	24 Laporan	
10.	Kegiatan Penertiban dan Penegakan Peraturan Daerah	Jl. TGP Dan Jl. Veteran RW 07	Jumlah laporan hasil operasi penindakan non yustisi terhadap pelaku/obyek pelanggar perda	24 Laporan	
			Jumlah laporan hasil penyelesaian, dan penindakan pelanggaran Perda	24 Laporan	

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11.	Kegiatan Penertiban dan Penegakan Peraturan Daerah	Jl. Veteran RT 01 RW 06	Jumlah laporan hasil operasi penindakan non yustisi terhadap pelaku/obyek pelanggar perda	24 Laporan	Diakomodir tetapi untuk kuantitas sesuai dengan jumlah anggaran yang ada
			Jumlah laporan hasil penyelesaian, dan penindakan pelanggaran Perda	24 Laporan	
12.	Kegiatan Penertiban dan Penegakan Peraturan Daerah	Kelurahan Sananwetan	Jumlah laporan hasil operasi penindakan non yustisi terhadap pelaku/obyek pelanggar perda	24 Laporan	
			Jumlah laporan hasil penyelesaian, dan penindakan pelanggaran Perda	24 Laporan	
13.	Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kelurahan Kauman	Jumlah laporan patroli penanganan gangguan ketertiban umum preemtif dan preventif	48 laporan	
14.	Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kelurahan Tanggung	Jumlah laporan patroli penanganan gangguan ketertiban umum preemtif dan preventif	48 laporan	
15.	Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum	Penduduk padat Kelurahan Sukorejo	Jumlah laporan patroli penanganan gangguan ketertiban umum preemtif dan preventif	48 laporan	
16.	Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum	Tanah kosong Jl. Brau Timur RW 10 Kelurahan Bendogerit	Jumlah laporan patroli penanganan gangguan ketertiban umum preemtif dan preventif	48 laporan	

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
17.	Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum	Lingkungan di Jl. Borobudur RT 004 rw 10 Kelurahan Bendogerit	Jumlah laporan patroli penanganan gangguan ketertiban umum preemtif dan preventif	48 laporan	Diakomodir tetapi untuk kuantitas sesuai dengan jumlah anggaran yang ada

### 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sambil menunggu diterbitkannya Permendagri yang mengatur tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021, maka telaahan terhadap kebijakan nasional masih sama dengan Tahun 2019 dan Tahun 2020. Prioritas Pembangunan Nasional sesuai dengan Tema RKP Tahun 2019 (RPJMN 2015-2019) “Memacu Investasi dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan” maka sasaran yang harus dicapai pada akhir tahun 2019 di Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat adalah sebagai berikut .

- 1) Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat masyarakat mencakup SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat Daerah provinsi dan SPM ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Daerah kabupaten/kota
- 2) Jenis pelayanan dasar pada SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat Daerah provinsi yaitu pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum provinsi
- 3) Jenis pelayanan dasar pada SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat Daerah kabupaten/kota terdiri atas:
  - a. pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
  - b. pelayanan informasi rawan bencana;
  - c. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
  - d. pelayanan penyelamatan bencana dan evakuasi korban bencana;
  - dan
  - e. pelayanan penyelamatan bencana dan evakuasi korban kebakaran.
- 4) Mutu pelayanan dasar untuk jenis pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada angka (2) dan ayat (3) ditetapkan dalam standar teknis, yang sekurang-kurangnya memuat:
  - a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
  - b. standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia; dan
  - c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

- 5) Penerima pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) yaitu Warga Negara dengan ketentuan :
- a. yang terkena dampak gangguan ketenteraman dan ketertiban umum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah provinsi dan peraturan Kepala Daerah provinsi untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum provinsi;
  - b. yang terkena dampak gangguan ketenteraman dan ketertiban umum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah kabupaten/kota dan peraturan kepala Daerah kabupaten/kota untuk jenis pelayanan dasar pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
  - c. yang berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana untuk jenis pelayanan dasar pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan
  - d. yang menjadi korban kebakaran atau terdampak kebakaran untuk jenis pelayanan dasar pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Dalam rangka mendukung prioritas nasional kelima terkait dengan stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu, maka sesuai dengan SE Nomor 05.12/7764/SJ, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Peraturan Pemerintah Nomor 84 tentang Satuan Perlindungan Masyarakat maka perlu dilakukan upaya yaitu dengan pelayanan Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi. Maka beberapa hal yang perlu diselaraskan dan diperhatikan dalam RKPD Tahun 2019 oleh pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

- 1) penanganan gangguan tarantibum dan linmas;
- 2) penanganan 1 pintu dan kerjasama dengan dinas sosial;

- 3) pengembangan sistem informasi deteksi gangguan ketenteraman dan ketertiban umum lintas daerah;
- 4) pengalokasian bimbingan teknis anggota satuan perlindungan masyarakat provinsi dan kabupaten/kota;
- 5) realokasi DAK untuk rehabilitasi dan pembangunan rumah/panti sosial masyarakat PGOT;
- 6) realokasi DAK untuk dukungan kinerja penyelenggaraan urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di daerah sebagai urusan wajib dan pelayanan dasar; dan
- 7) realokasi DAK untuk dukungan kinerja penyelenggaraan urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di daerah sebagai urusan wajib dan pelayanan dasar.

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan Satpol PP maka perlu dilakukan upaya fasilitasi peningkatan Kapasitas SDM, peningkatan kapasitas PPNS. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya. Pelayanan di bidang rawan bencana juga perlu diperhatikan mengingat bahwa dengan upaya pelayanan Informasi Rawan Bencana, Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran agar masyarakat dapat mengetahui bahwa bencana dapat menimpa wilayah mereka dan dapat membahayakan keselamatan mereka kemudian pelayanan penyelamatan ini dilakukan untuk mempercepat datangnya bantuan dan pertolongan yang diperlukan. Beberapa upaya diatas dilakukan dengan sasaran menurunnya indeks risiko bencana daerah. Dengan memahami pernyataan di atas dan sebagai tindaklanjut maka hal-hal yang perlu diperhatikan pemerintah daerah dalam RKPD Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- 1) pengintegrasian pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah;
- 2) penyusunan kajian risiko bencana;
- 3) penyusunan rencana penanggulangan bencana;

- 4) sosialisasi informasi kemungkinan dampak bencana;
- 5) pilihan tindakan pengurangan risiko bencana;
- 6) penyusunan Rencana Tindak Darurat Kebakaran (RTDK);
- 7) pemetaan potensi ancaman bahaya kebakaran diseluruh jenis/tipologi kebakaran (Mitigasi);
- 8) penyuluhan, penyebaran informasi pelarangan dan peringatan waspada bahaya kebakaran;
- 9) pengendalian pencegahan dan kesiapsiagaan bencana dan kebakaran (Pusdalops);
- 10) pembentukan desa tangguh bencana;
- 11) pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung pencegahan dan penanggulangan bencana dan kebakaran;
- 12) pembuatan rencana kontijensi;
- 13) pelatihan/simulasi kesiapsiagaan aparaturnya dan masyarakat;
- 14) kajian risiko kebakaran dan penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK);
- 15) pengadaan peralatan perlindungan dan rencana pembangunan akses perlindungan bencana dan kebakaran;
- 16) inspeksi sistem keselamatan kebakaran;
- 17) penyusunan kebijakan/regulasi tentang bencana dan kebakaran;
- 18) membentuk posko tanggap darurat;
- 19) pencarian dan penyelamatan korban bencana;
- 20) evakuasi/pemindahan korban bencana dari lokasi bencana ke tempat penampungan sementara;
- 21) operasional administrasi dan komunikasi fungsi sekretariat kantor pemadam kebakaran;
- 22) membentuk Poskotis (Pos Komando Teknis);
- 23) kaji cepat/*Size Up*;
- 24) operasi pemadaman;
- 25) pencarian dan penyelamatan korban kebakaran;
- 26) evakuasi/pemindahan korban kebakaran dari lokasi kebakaran ke tempat aman dan atau penampungan pertama untuk mendapatkan tindakan penanganan;
- 27) pengurangan kesenjangan antarwilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman;

- 28) penyusunan peta dan kajian risiko bencana;
- 29) pengembangan sistem dan peralatan peringatan dini bencana dengan teknologi sederhana;
- 30) pembangunan sistem data informasi kebencanaan daerah;
- 31) sosialisasi kesadaran terhadap bencana;
- 32) gladi dan simulasi kebencanaan;
- 33) diseminasi informasi kebencanaan daerah dan PUSDALOPS;
- 34) integrasi sistem informasi kebencanaan lintas sektor dan PUSDALOPS;
- 35) penyediaan layanan komunikasi kedaruratan dan PUSDALOPS;
- 36) penyusunan peta dan kajian risiko bencana;
- 37) penyusunan dan reviu rencana penanggulangan bencana;
- 38) penyusunan rencana kontinjensi;
- 39) penetapan kawasan rawan bencana geologi, wilayah sungai, dan pesisir;
- 40) pembuatan rambu dan papan peringatan bencana;
- 41) pembentukan relawan penanggulangan bencana;
- 42) desa tangguh bencana;
- 43) penyediaan logistik kebencanaan;
- 44) penyediaan peralatan dasar kebencanaan; dan
- 45) pengembangan sistem dan peralatan peringatan dini bencana dengan teknologi sederhana.

### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi OPD untuk mencapai dan melaksanakannya dalam tahun tertentu.

Adapun penetapan tujuan, sasaran, dan indikator kinerja tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar di tahun 2020 sebagaimana dalam **Tabel 3.1** di bawah ini.

**Tabel 3.1**  
**Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar**  
**Tahun 2021**

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	
			2018		2019		2020	2021
1.	Tujuan : Menciptakan situasi kondisi masyarakat yang tertib	Persentase penurunan jumlah pelanggaran perda	8,97 %	8,40 %	3,98 %	4,79 %	1,53 %	0,67 %
1.1	Sasaran 1 : Meningkatnya ketaatan masyarakat terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Persentase pelanggaran peraturan daerah yang tertangani sesuai prosedur	86,44 %	85,63 %	90,42 %	85,34 %	91,95 %	92,61 %
1.2	Sasaran 2 : Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan fungsi perlindungan masyarakat	Persentase penurunan jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban umum	14,63 %	40,35 %	7,74 %	0,22 %	3,78 %	1,74 %
		Rasio petugas perlindungan masyarakat di kabupaten / kota	0,46	0,46	0,64	0,69 %	0,82	1,00 %
1.3	Sasaran 3 : Meningkatnya penanganan bahaya kebakaran	Persentase respon penanggulangan kebakaran yang sesuai SOP, SPP, SPM	78 %	100 %	79 %	100 %	80 %	85 %

## BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

**P**rogram adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi sebagai wujud implementasi strategi dan kebijakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran. Program juga dapat diartikan sebagai instrumen untuk mengetahui tingkat keberhasilan sasaran dan tujuan yang hendak dicapai, maka ditentukan Indikator kinerja. Indikator kinerja dimaksud harus spesifik dan jelas untuk menghindari terjadinya mis-interpretasi, fleksibel terhadap perubahan, dapat diukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif dan mengandung aspek – aspek yang relevan.

Faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan :

### 1. Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Perumusan program dan kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar diarahkan untuk mencapai visi dan misi Walikota Blitar sehingga program dan kegiatan dalam Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar merupakan implementasi dari upaya pencapaian visi dan misi Walikota Blitar.

### 2. Pemberantasan Kemiskinan

Sejalan dengan upaya negara – negara berkembang untuk mengurangi jumlah masyarakat miskin, maka Pemerintah Indonesia dengan bersinergi dengan Pemerintah provinsi dan Kabupaten/Kota sangat serius dalam upayanya mengentaskan kemiskinan. Kemiskinan banyak digambarkan sebagai suatu keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memnuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global yang butuh perhatian serius.

Upaya penanggulangan kemiskinan mendapat perhatian serius dari pemerintah Kota Blitar. Program dan kegiatan yang dirancang pada tahun

2020 diarahkan pada upaya pemantapan daya saing ekonomi daerah yang didukung manajemen SDM dan profesionalisme aparatur.

### 3. Pencapaian SPM

Perumusan program dan kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar diarahkan untuk mencapai standard pelayanan minimal sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 *tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal*, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 *tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten / Kota* dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 *tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota*. Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum meliputi :

- a. Standar operasional prosedur Satpol PP
- b. Standar sarana prasarana Satpol PP
- c. Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat; dan
- d. Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada.

Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten / Kota meliputi :

- a. Tingkat waktu tanggap ( response time ) 15 menit sejak diterimanya informasi / laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi;
- b. Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi;
- c. Sarana prasarana pemadam kebakaran, penyelamatan dan evakuasi;
- d. Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan / sumber daya manusia;
- e. Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga Negara yang menjadi korban kebakaran; dan
- f. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga Negara yang terdampak kebakaran.

### 4. Pendayagunaan Potensi Ekonomi Daerah

Pengembangan potensi ekonomi Kota Blitar pada tahun 2020 difokuskan pada pematapan daya saing ekonomi daerah yang didukung manajemen SDM dan profesionalisme. Pembangunan pada tahun kelima difokuskan pada bidang / sektor yang masih perlu ditingkatkan pencapaian kinerjanya berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap capaian program prioritas yang telah dilaksanakan selama 5 ( lima ) tahun terakhir. Pada bidang social budaya difokuskan pada peningkatan kualitas dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan serta meningkatnya good governance.

Jumlah program yang diusulkan untuk dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar tahun 2020 adalah 6 program dan 16 kegiatan. Selanjutnya, program dan kegiatan – kegiatan diatas diuraikan beserta kerangka pendanaan sebagaimana **Tabel 4.1** berikut :

**Tabel 4.1**  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan PD Tahun 2021**  
**Dan Prakiraan Maju Tahun 2022**  
**Kota Blitar**

Nama Perangkat Daerah : Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat								
1.05.01.01	Program Pelayanan Perkantoran	Persentase kecukupan pelayanan perkantoran	Kota Blitar	100 %	573.565.415,-	APBD		100 %	602.243.686,-
1.05.01.01.01	Kegiatan Pengelolaan Administrasi Perkantoran	Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia	Kota Blitar	46 macam	28.384.294,-	APBD		46 macam	29.803.509,-
		Jumlah barang cetakan yang tersedia		6 cetakan			6 cetakan		
		Jumlah lembar penggandaan		18680 lembar			1860 lembar		
		Jumlah bahan bacaan yang tersedia		2 bahan bacaan			2 bahan bacaan		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Jumlah dos/kotak makanan dan minuman yang tersedia		340 dos				340 dos	
		Jumlah porsi makanan minuman yang tersedia		100 porsi				100 porsi	
1.05.01.01.02	Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Jumlah rapat rapat koordinasi dan konsultasi regional dan nasional yang diikuti	Kota Blitar	37 rakor	162.192.100,-	APBD		37 rakor	170.301.705,-
1.05.01.01.03	Kegiatan Penyediaan Jasa Perkantoran	jumlah iuran kebersihan yang terbayarkan	Kota Blitar	2 iuran	1.320.000,-	APBD		2 iuran	1.386.000,-
1.05.01.01.04	Kegiatan Penyusunan Perencanaan, Pengelolaan Dan Pelaporan Sarana Prasarana Perkantoran	Jumlah rekening yang terbayarkan	Kota Blitar	3 rekening	380.249.721,-	APBD		3 rekening	399.262.207,-
		Jumlah kendaraan dinas yang terbayarkan pajaknya		32 unit				28 unit	
		Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia		11 komponen				11 komponen	
		Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang tersedia		24 macam				24 macam	
		Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpenuhi		-				-	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Jumlah peralatan gedung kantor yang terpenuhi		-				-	
		Jumlah perlengkapan bangunan kantor yang terpelihara		2 macam				2 macam	
		Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara		10 macam				10 macam	
		Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara		32 unit				32 unit	
		Jumlah kendaraan dinas/operasional yang tersedia		-				-	
		Jumlah bangunan kantor yang terpelihara		2 unit				2 unit	
		Jumlah bangunan kantor yang terehab		-				-	
1.05.01.01.05	Kegiatan Penyusunan Dan Pelaporan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen ketatalaksanaan yang tersusun	Kota Blitar	6 dokumen	505.800,-	APBD		6 dokumen	531.090,-
1.05.01.01.06	Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah jenis dokumen laporan keuangan yang tersusun	Kota Blitar	4 dokumen	913.500,-	APBD		4 dokumen	959.175,-
<b>1.05.01.02</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Perangkat Daerah</b>	<b>Tingkat partisipasi aktif perangkat daerah dalam agenda pemda kota blitar</b>	<b>Kota Blitar</b>	<b>100 %</b>	<b>134.117.020,-</b>	<b>APBD</b>			<b>140.822.871,-</b>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.05.01.02.0 1	Kegiatan Pengelolaan Administrasi Dan Kelengkapan Kepegawaian	Jumlah event daerah dan hari besar nasional yang diikuti	Kota Blitar	4 event	126.782.020,-	APBD		4 event	133.121.121,-
		Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang terpenuhi		34 macam				34 macam	
		Jumlah pegawai yang mendapatkan fasilitas pembinaan kepegawaian		54 orang				54 orang	
1.05.01.02.0 2	Kegiatan Pengelolaan publikasi dan informasi Perangkat Daerah	Jumlah publikasi program/kegiatan perangkat daerah	Kota Blitar	2 publikasi	7.335.000,-	APBD		2 publikasi	7.701.750,-
1.05.01.03	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan</b>	<b>Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan perangkat daerah tersusun tepat waktu dan sesuai aturan</b>	Kota Blitar	100 %	3.041.000,-	APBD		100 %	3.193.050,-
		<b>Nilai SKM</b>		<b>Baik</b>				<b>Baik</b>	
1.05.01.03.0 1	Kegiatan Penyusunan Dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun	Kota Blitar	7 dokumen	3.041.000,-	APBD		7 dokumen	3.193.050,-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.05.01.05	Program Peningkatan Kenyamanan Lingkungan	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang tertangani sesuai prosedur	Kota Blitar	86,34 %	11.004.024.003,-	APBD		86,34 %	11554.225.204,-
		Persentase poskamling aktif		75,01 %				75,01 %	
1.05.01.05.01	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparat Satuan Perlindungan Masyarakat	Jumlah peserta pelatihan tanggap darurat	Kota Blitar	150 orang	952.144.250,-	APBD		150 orang	999.751.463,-
		Jumlah laporan hasil patroli wilayah terkait ketertiban umum		21 laporan				21 laporan	
		Jumlah anggota Linmas yang terlibat dalam kegiatan Satpol PP		803 orang				803 orang	
1.05.01.05.02	Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah lokasi gedung pemkot blitar yang diamankan	Kota Blitar	21 lokasi	9.912.541.353,-	APBD		21 lokasi	10.408.168.421,-
		Jumlah laporan pengamanan lokasi kegiatan pemerintah daerah dan pejabat negara		70 laporan				70 laporan	
		Jumlah laporan patroli penanganan gangguan ketertiban umum preemtif dan preventif		48 laporan				48 laporan	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.05.01.05.03	Kegiatan Pengendalian, Operasional dan Penanganan Gangguan Ketertiban Umum	Jumlah laporan hasil operasi gabungan penanganan gangguan ketertiban umum secara represif non yustisi ----- Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan terkait Polisi Pamong Praja	Kota Blitar	24 laporan  59 orang	139.338.400,-	APBD		24 laporan  59 orang	146.305.320,-
1.05.01.06	<b>Program Peningkatan Pencegahan Dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran</b>	<b>Persentase korban kebakaran yang tertangani</b>	Kota Blitar	100 %	538.937.200,-	APBD		100 %	565.884.060,-
1.05.01.06.01	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	Jumlah peserta sosialisasi pencegahan kebakaran ----- Jumlah peralatan dan perlengkapan pemadam kebakaran yang sesuai dengan standar ----- Jumlah hydrant yang tersedia ----- Jumlah hydrant yang terpelihara	Kota Blitar	200 orang  5 macam  -  21 unit	538.937.200,-	APBD		200 orang  2 macam  -  21 unit	565.884.060,-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.05.01.07	<b>Program Penertiban dan Penegakan Peraturan Perundangan Daerah</b>	<b>Jumlah pelanggaran perda</b>	Kota Blitar	<b>448 pelanggaran</b>	<b>253.400.850,-</b>	<b>APBD</b>		<b>448 pelanggaran</b>	<b>266.070.893,-</b>
1.05.01.07.01	Kegiatan Penyuluhan dan Pengembangan Penegakan Peraturan Daerah	Jumlah peserta sosialisasi produk hukum daerah terkait ketentraman dan ketertiban umum	Kota Blitar	530 orang	85.920.020,-	APBD		530 orang	90.216.021,-
		Jumlah peserta koordinasi penegakan perda dan perkara		80 orang				80 orang	
1.05.01.07.02	Kegiatan Penyelidikan dan Pengawasan Pelanggaran Peraturan Perundangan Daerah	Jumlah laporan penyelidikan dan pengawasan pelanggaran peraturan perundangan daerah oleh PPNS	Kota Blitar	24 laporan	37.893.080,-	APBD		24 laporan	39.787.734,-
		Jumlah anggota Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas penegakan PERDA		54 orang				54 orang	
1.05.01.07.03	Kegiatan Penertiban dan Penegakan Peraturan Daerah	Jumlah laporan hasil operasi penindakan non yustisi terhadap pelaku/obyek pelanggaran perda	Kota Blitar	24 laporan	129.587.750,-	APBD		24 laporan	136.067.138,-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Jumlah laporan hasil penyelesaian, dan penindakan pelanggaran Perda		24 laporan				24 laporan	

## BAB V. PENUTUP

**R**encana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2021 dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar memberikan gambaran tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021 sebagai penjabaran Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar 2021. Rencana ini disusun setelah mempertimbangkan dengan seksama hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahun 2020. Rencana Kerja sebagai pedoman bagi Satuan Polisi Pamong Praja di dalam melaksanakan program dan kegiatan satu tahun kedepan, memperhatikan hal – hal sebagai berikut:

### 1. Catatan Penting yang Perlu Mendapat Perhatian

Bahwa pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2021 menyesuaikan anggaran yang tersedia.

### 2. Kaidah – kaidah Pelaksanaan

- a. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar berkewajiban untuk mengimplementasikan pencapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021 serta diselaraskan dengan RKPD Kota Blitar tahun 2021;
- b. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2021 dengan berpedoman kepada Renja Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2021 ;
- c. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021, wajib dilaksanakan pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan tahun 2021.
- d. Dalam mengantisipasi adanya perubahan lingkungan yang sangat kompleks, pesat dan tidak menentu, maka selama kurun waktu berlakunya Renja tahun 2021 ini, dapat dilakukan upaya kajian dan bila perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian seperlunya

### 3. Rencana Tindak Lanjut

Rencana Kerja (Renja) selain sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2021 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja. Untuk dapat merealisasikan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021 tentu juga dipengaruhi oleh sumber pembiayaan/pendanaan yang memadai serta kompetensi dan semangat, tekad serta kedisiplinan dalam memprioritaskan program dan kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia.

Akhirnya, Renja Perangkat Daerah ini diharapkan dipergunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar tahun 2021. Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah ini dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras oleh sumber daya yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar, sehingga hasilnya diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi upaya Pemerintah Kota Blitar dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Blitar, Mei 2020

Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

Kota Blitar



**MUH. HADI MASKUN, SE**

Pembina Tingkat I

NIP 19640617199003101



**PEMETAAN SESUAI PMDN 90 TAHUN 2019 ALOKASI ANGGARAN TAHUN 2021**

Lampiran I

PERANGKAT DAERAH	KODE				KEGIATAN LAMA	KODE					SUB KEGIATAN PMDN 90	PAGU ( Rp )
	Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan		Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1	05.01	00	00	Belanja Tidak langsung ( Gaji dan Tunjangan )	1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	#REF!
	1	05.01	01	01	Pengelolaan Administrasi Perkantoran	1	05	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	#REF!
						1	05	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	#REF!
						1	05	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	#REF!
						1	05	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	#REF!
	1	05.01	01	02	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	1	05	01	2.03	18	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	#REF!
	1	05.01	01	03	Penyediaan Jasa Perkantoran	1	05	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	#REF!
	1	05.01	01	04	Penyusunan Perencanaan, Pengelolaan dan Pelaporan Sarana Prasarana Perkantoran	1	05	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	#REF!
						1	05	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	#REF!
						1	05	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	#REF!
						1	05	01	2.03	14	Penyediaan Peralatan rumah Tangga	#REF!

					1	05	01	2.03	32	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	#REF!
					1	05	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	#REF!
					1	05	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan dinas / Operasional	#REF!
					1	05	01	2.03	28	Pemeliharaan rutin / Berkala Gedung Kantor	#REF!
					1	05	01	2.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	#REF!
					1	05	01	2.04	01	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	#REF!
1	05.01	01	05	Penyusunan dan Pelaporan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah	1	05	01	2.01	03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	#REF!
1	05.01	01	06	Penyusunan Laporan Keuangan	1	05	01	2.02	07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	#REF!
1	05.01	02	01	Pengelolaan Administrasi dan Kelengkapan Kepegawaian	1	05	01	2.04	10	Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan	#REF!
					1	05	01	2.04	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	#REF!
1	05.01	02	02	Pengelolaan Publikasi dan Informasi Perangkat Daerah	1	05	01	2.04	10	Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan	#REF!
1	05.01	03	01	Penyusunan dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	1	05	01	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	#REF!
1	05.01	05	01	Peningkatan Kapasitas Aparat Satuan Perlindungan Masyarakat	1	05	02	2.01	03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten / Kota	#REF!
					1	05	02	2.01	04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	#REF!
1	05.01	05	02	Pengawasan dan Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum	1	05	02	2.01	01	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	#REF!

					1	05	02	2.01	08	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	#REF!
1	05.01	05	03	Pengendalian, Operasional dan Penanganan Gangguan Ketertiban Umum	1	05	02	2.01	02	Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada	#REF!
					1	05	02	2.01	05	Peningkatan Kapasitas SDM Satpol Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	#REF!
1	05.01	07	02	Penyelidikan dan Pengawasan Pelanggaran Peraturan Perundangan Daerah	1	05	02	2.01	05	Peningkatan Kapasitas SDM Satpol Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	#REF!
					1	05	02	2.01	06	Pembinaan Jabatan Fungsional Sapol Polisi Pamong Praja	#REF!
1	05.01	06	01	Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	1	05	04	2.04	01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	#REF!
					1	05	04	2.02	01	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	#REF!
					1	05	04	2.02	02	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	#REF!
					1	05	04	2.01	01	Pencegahan Kebakaran dalam daerah Kabupaten / Kota	#REF!
					1	05	04	2.01	02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten / Kota	#REF!
					1	05	04	2.01	03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	#REF!

					1	05	04	2.01	04	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten / Kota	#REF!
1	05.01	07	01	Penyuluhan dan Pengembangan Penegakan Peraturan Daerah	1	05	02	2.02	01	Sosialisasi Penegakan Peraturan daerah dan Peraturan Bupati / Walikota	#REF!
1	05.01	07	02	Penyelidikan dan Pengawasan Pelanggaran Peraturan Perundangan Daerah	1	05	02	2.02	02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / Walikota	#REF!
1	05.01	07	01	Penyuluhan dan Pengembangan Penegakan Peraturan Daerah	1	05	02	2.02	02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / Walikota	#REF!
					1	05	02	2.03	01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	#REF!
1	05.01	07	03	Penertiban dan Penegakan Peraturan Daerah	1	05	02	2.02	03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Bupati / Walikota	#REF!
<b>Jumlah Total</b>											#REF!

Blitar, Mei 2020

Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
Kota Blitar



**MUH. HADI MASKUN, SE**

NIP 196406171990031010

Pembina Tingkat I

PEMETAAN SESUAI PMDN 90 TAHUN 2019 ALOKASI ANGGARAN TAHUN 2021

Lampiran II

PERANGKAT DAERAH / UNIT PERANGKAT DAERAH	KODE				KEGIATAN LAMA	INDIKATOR KEGIATAN	KODE					SUB KEGIATAN PMDN 90	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	SATUAN	PAGU ( Rp )
	Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan			Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1	05.01	00	00	Belanja Tidak langsung ( Gaji dan Tunjangan )		1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang dibavarkan			5,148,485,300.00
	1	05.01	01	01	Pengelolaan Administrasi Perkantoran	Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia	1	05	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia	46	macam	10,345,830.00
						Jumlah barang cetakan yang tersedia	1	05	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang tersedia	6	cetakan	3,098,900.00
						Jumlah lembar penggandaan							Jumlah lembar penggandaan	18680	lembar	4,081,584.00
						Jumlah bahan bacaan yang tersedia	1	05	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia	2	bahan bacaan	4,080,000.00
						Jumlah dos / kotak makanan dan minuman yang tersedia	1	05	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah dos / kotak makanan dan minuman yang tersedia	340	dos	6,677,980.00
						Jumlah porsi makanan minuman yang tersedia							Jumlah porsi makanan minuman yang tersedia	100	porsi	-
	1	05.01	01	02	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Jumlah rapat - rapat koordinasi dan konsultasi regional dan nasional yang diikuti	1	05	01	2.03	18	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah rapat - rapat koordinasi dan konsultasi regional dan nasional yang diikuti	37	rakor	162,192,100.00

	1	05.01	01	03	Penyediaan Jasa Perkantoran	Jumlah iuran kebersihan yang terbayarkan	1	05	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah iuran kebersihan yang terbayarkan	2	iuran	1,320,000.00
	1	05.01	01	04	Penyusunan Perencanaan, Pengelolaan dan Pelaporan Sarana Prasarana Perkantoran	Jumlah rekening yang terbayarkan	1	05	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang terbayarkan	3	rekening	68,400,000.00
						Jumlah kendaraan dinas yang terbayarkan pajaknya	1	05	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara dan terbayarkan perizinannya	32	unit	18,372,371.00
						Jumlah jenis komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang tersedia	1	05	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang tersedia	11	komponen	5,464,180.00
						Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang tersedia	1	05	01	2.03	14	Penyediaan Peralatan rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang tersedia	24	macam	3,295,730.00
						Jumlah perlengkapan bangunan kantor yang terpelihara	1	05	01	2.03	32	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	2	macam	13,477,400.00
						Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	1	05	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	10	macam	5,248,960.00
						Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara	1	05	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan dinas / Operasional	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara	32	unit	247,777,180.00
						Jumlah bangunan kantor yang terpelihara	1	05	01	2.03	28	Pemeliharaan rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah bangunan kantor yang terpelihara	2	unit	18,500,900.00

							1	05	01	2.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi		macam	701,600.00
							1	05	01	2.04	01	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Jumlah Mesin/Kartu Absensi yang terpenuhi	0	unit	-
	1	05.01	01	05	Penyusunan dan Pelaporan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen ketatalaksanaan yang tersusun	1	05	01	2.01	03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen evaluasi perangkat daerah yang tersusun	6	dokumen	505,800.00
	1	05.01	01	06	Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah jenis dokumen laporan keuangan yang tersusun	1	05	01	2.02	07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Jumlah jenis Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran yang disusun	4	dokumen	913,500.00
	1	05.01	02	01	Pengelolaan Administrasi dan Kelengkapan Kepegawaian	Jumlah event daerah dan hari besar nasional yang diikuti	1	05	01	2.04	10	Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan	Jumlah event daerah dan hari besar nasional yang diikuti	4	event	30,074,800.00
						Jumlah pegawai yang mendapatkan fasilitasi pembinaan kepegawaian							Jumlah pegawai yang mendapatkan fasilitasi pembinaan kepegawaian	54	orang	10,413,120.00
						Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang terpenuhi	1	05	01	2.04	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang terpenuhi	34	macam	85,405,500.00
	1	05.01	02	02	Pengelolaan Publikasi dan Informasi Perangkat Daerah	Jumlah publikasi program / kegiatan perangkat daerah	1	05	01	2.04	10	Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan	Jumlah publikasi program / kegiatan perangkat daerah	2	publikasi	7,335,000.00
	1	05.01	03	01	Penyusunan dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun	1	05	01	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah jenis koordinasi dan sinkronisasi perencanaan perangkat daerah	7	dokumen	3,041,000.00

	1	05.01	05	01	Peningkatan Kapasitas Aparat Satuan Perlindungan Masyarakat	Jumlah laporan hasil patroli wilayah terkait ketertiban umum	1	05	02	2.01	03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten / Kota	Jumlah laporan hasil patroli wilayah terkait ketertiban umum	21	laporan	32,780,660.00
						Jumlah anggota linmas yang terlibat dalam kegiatan satpol PP	1	05	02	2.01	04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah anggota linmas yang terlibat dalam kegiatan satpol PP	803	orang	919,363,590.00
													Jumlah peserta pelatihan tanggap darurat	100	orang	-
	1	05.01	05	02	Pengawasan dan Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah lokasi gedung pemkot blitar yang diamankan	1	05	02	2.01	01	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah lokasi gedung pemkot blitar yang diamankan	38	lokasi	9,826,913,903.00
						Jumlah laporan pengamanan lokasi kegiatan pemerintah daerah dan pejabat negara							Jumlah laporan pengamanan lokasi kegiatan pemerintah daerah dan pejabat negara	70	laporan	65,492,450.00
						Jumlah laporan patroli penanganan gangguan ketertiban umum preemtif dan preventif							Jumlah laporan patroli penanganan gangguan ketertiban umum secara preemtif dan preventif	48	laporan	20,135,000.00
							1	05	02	2.01	08	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah jenis sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum yang terpenuhi dan terpelihara	0	macam	-

	1	05.01	05	03	Pengendalian, Operasional dan Penanganan Gangguan Ketertiban Umum	Jumlah laporan hasil operasi gabungan penanganan gangguan ketertiban umum secara represif non yustisi	1	05	02	2.01	02	Penindakan atas Gangguan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada	Jumlah laporan hasil operasi gabungan penanganan gangguan ketertiban umum secara represif non yustisi	24	laporan	16,046,000.00
						Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan terkait Polisi Pamong Praja	1	05	02	2.01	05	Peningkatan Kapasitas SDM Satpol Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan terkait Polisi Pamong Praja	59	orang	123,292,400.00
	1	05.01	07	02	Penyelidikan dan Pengawasan Pelanggaran Peraturan Perundangan Daerah	Jumlah anggota Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas penegakan PERDA							Jumlah anggota Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas penegakan PERDA	54	orang	10,162,400.00
							1	05	02	2.01	06	Pembinaan Jabatan Fungsional Satpol Polisi Pamong Praja	Jumlah pejabat fungsional yang memperoleh pembinaan	3	orang	
	1	05.01	06	01	Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	Jumlah peserta sosialisasi pencegahan kebakaran	1	05	04	2.04	01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah peserta sosialisasi pencegahan kebakaran	200	orang	36,781,800.00
						Jumlah peralatan dan perlengkapan pemadam kebakaran yang sesuai dengan standar	1	05	04	2.02	01	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah peralatan dan perlengkapan pemadam kebakaran yang sesuai dengan standar	5	macam	424,803,400.00
						Jumlah hydran yang terpelihara	1	05	04	2.02	02	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah hydran yang terpelihara	21	unit	11,472,000.00

						1	05	04	2.01	01	Pencegahan Kebakaran dalam daerah Kabupaten / Kota	Jumlah wilayah pemadam kebakaran	21	wilayah	22,800,000.00	
						1	05	04	2.01	02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah kejadian kebakaran yang tertangani	12	kejadian	7,980,000.00	
						1	05	04	2.01	03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah kejadian kebakaran dan non kebakaran yang diselamatkan dan dievakuasi	12	kejadian	35,100,000.00	
						1	05	04	2.01	04	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah kejadian bahan berbahaya dan beracun yang tertangani	2	kejadian	-	
	1	05.01	07	01	Penyuluhan dan Pengembangan Penegakan Peraturan Daerah	Jumlah peserta sosialisasi produk hukum terkait ketentraman dan ketertiban umum	1	05	02	2.02	01	Sosialisasi Penegakan Peraturan daerah dan Peraturan Bupati / Walikota	Jumlah peserta sosialisasi produk hukum terkait ketentraman dan ketertiban umum	530	orang	85,920,020.00
	1	05.01	07	02	Penyelidikan dan Pengawasan Pelanggaran Peraturan Perundangan Daerah	Jumlah laporan penyelidikan dan pengawasan pelanggaran peraturan perundangan daerah oleh PPNS	1	05	02	2.02	02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / Walikota	Jumlah laporan penyelidikan dan pengawasan pelanggaran peraturan perundangan daerah oleh PPNS	24	laporan	7,424,930.00
	1	05.01	07	01	Penyuluhan dan Pengembangan Penegakan Peraturan Daerah	Jumlah peserta koordinasi penegakan perda dan perkada							Jumlah peserta koordinasi penegakan perda dan perkada	80	orang	20,305,750.00
							1	05	02	2.03	01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah anggota PPNS yang memperoleh pengembangan kapasitas dan karier PPNS	2	orang	-

	1	05.01	07	03	Penertiban dan Penegakan Peraturan Daerah	Jumlah laporan hasil operasi penindakan non yustisi terhadap pelaku / obyek pelanggaran perda	1	05	02	2.02	03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Bupati / Walikota	Jumlah laporan hasil operasi penindakan non yustisi terhadap pelaku / obyek pelanggaran perda	24	laporan	129,587,750.00
						Jumlah laporan hasil penyelesaian dan penindakan pelanggaran perda							Jumlah laporan hasil penyelesaian dan penindakan pelanggaran perda	24	laporan	
<b>Jumlah Total</b>																<b>17,655,570,788.00</b>

**Catatan :**

# Anggaran tersebut di atas termasuk anggaran untuk fasilitasi anggota linmas dalam rangka pilkada ( sub kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum ) sejumlah Rp 919.363.590,00

# Apabila pilkada dilaksanakan pada tahun 2020, maka anggarannya akan digeser untuk pembangunan penambahan ruangan kantor , pelatihan terhadap 100 orang anggota linmas ( target IKU )

Blitar, Mei 2020

Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
Kota Blitar



**MUH. HADI MASKUN, SE**  
NIP 196406171990031010  
Pembina Tingkat I









538,937,200.00